

Kabupaten
Mojokerto



PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp. (0321) 321262 - 325919 Fax (0321) 321262
Website : <http://www.bappeda.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 188.4 / 25 / 416 – 201 / 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun berjalan serta merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu dirumuskan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025;
- b. bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Perubahan Rencana

Kerja Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor Seri);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor);
19. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 97);
20. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 53);
21. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor);

22. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor);
23. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor);
24. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupten Mojokerto Nomor : 188.4/28/416-201/2024 Tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Periode 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, Dan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
25. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupten Mojokerto Nomor : 188.4/ /416-201/2025 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2025.
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2025 yang selanjutnya disebut P-RENJA BAPPEDA Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025.
- KEDUA : P-RENJA BAPPEDA Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, sub kegiatan, indikator sub kegiatan, dan acuan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai tolok ukur capaian kinerja tahun berjalan.

- KETIGA : P-RENJA BAPPEDA Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN
- BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : PENUTUP
- KEEMPAT : P-RENJA BAPPEDA Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Pagu Anggaran Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 01 Juli 2025

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19660618 199003 1 011

KATA PENGANTAR

Pembangunan merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat, dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah Daerah yaitu APBD dan P-APBD.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, diperlukan suatu perencanaan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah, diantaranya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan diikuti oleh penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sedangkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (P-RKPD) diikuti Perubahan Rencana Kerja PD (P-Renja PD) .

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya. Semoga hasil pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja dapat direalisasikan dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs.BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660618 199003 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iiiii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II 8

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN BERKENAAN 8

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I 9

2.2 Review terhadap P-RKPD 32

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 588

BAB III 599

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 599

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan 599

3.2. *Tagging* Tematik 800

BAB IV 933

PENUTUP 933

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja 93

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 94

4.3. Rencana Tindak Lanjut 95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Pearngkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 12

Tabel 2.2 Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Mojokerto 34

Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Perubahan Renja Tahun 2025 Kabupaten Mojokerto..... 588

Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan P-RENJA 2025 BAPPEDA 611

Tabel 3.2 *Tagging* Subkegiatan P-RENJA 2025 BAPPEDA..... 822

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap dokumen perencanaan memiliki keterkaitan hierarkis dan fungsional yang saling menopang. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan perencanaan operasional tahunan yang menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang kemudian menjadi acuan utama dalam penyusunan APBD setiap tahun. Dalam konteks ini, RENJA bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk menjamin keterpaduan, kesinambungan, dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Penyusunan Perubahan RENJA Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 merupakan respons terhadap dinamika kebijakan, tantangan pembangunan terkini, serta penyempurnaan strategi organisasi berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan RENJA tahun berjalan. Perubahan ini diperlukan guna menjamin bahwa seluruh upaya pembangunan yang difasilitasi oleh Bappeda tetap berada dalam satu keselarasan strategis dengan berbagai dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. Perubahan tersebut mencakup:

1. Perubahan RENJA ini bertumpu pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang mengusung visi: “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur.” Visi ini kemudian dijabarkan dalam lima misi pembangunan daerah, di mana Misi Pertama yaitu “Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik” menjadi dasar langsung dari peran kelembagaan Bappeda. Misi ini diperkuat oleh tujuan strategis RPJMD yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan, Akuntabel, dan Responsif.”

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab pada urusan perencanaan, penelitian, dan pengembangan, Bappeda Kabupaten Mojokerto telah merumuskan tujuan dalam RENSTRA 2025-2029 yaitu “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah” yang diwujudkan melalui dua sasaran utama:

- 1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah, dan
- 2) Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah.

Sasaran ini selaras dengan fungsi utama Bappeda dalam membangun sistem perencanaan yang terintegrasi, berbasis bukti, dan adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan.

2. Tema pembangunan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah: “Penguatan Ekonomi Inklusif dan SDM Unggul dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif.” Dalam konteks ini, Bappeda berperan strategis sebagai pusat sinkronisasi dan integrasi antar urusan pemerintahan, pengarah arah prioritas pembangunan, serta fasilitator inovasi kebijakan lintas perangkat daerah. Dalam Perubahan RENJA 2025, Bappeda diarahkan untuk memastikan bahwa perencanaan program/kegiatan oleh seluruh OPD mencerminkan keterpaduan, relevansi terhadap tujuan RPJMD, serta memiliki dasar analitis yang kuat.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan RKP 2025 secara eksplisit mendorong transformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Tiga agenda prioritas nasional yang relevan dengan mandat Bappeda antara lain:
 - 1) Penguatan sistem perencanaan berbasis data dan evaluasi;
 - 2) Penerapan *Evidence-Based Policy* (EBP) dalam siklus kebijakan; dan
 - 3) Penguatan peran riset dan inovasi untuk mendorong efektivitas kebijakan pembangunan.

Selain itu, integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) juga menjadi komponen kunci. Khususnya Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh) dan Tujuan 17 (Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan), yang mana keduanya sangat terkait dengan fungsi Bappeda sebagai institusi penggerak tata kelola dan kolaborasi kebijakan.

4. Di tingkat provinsi, peran Bappeda Kabupaten Mojokerto juga berkaitan erat dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur, terutama dalam integrasi perencanaan kewilayahan, penyesuaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD), serta sinergi antarprogram prioritas lintas kewilayahan. Dalam konteks perencanaan tematik seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan bencana, transformasi digital, dan hilirisasi ekonomi, Bappeda di daerah harus menyesuaikan sasaran dan programnya agar tetap mendukung arah pembangunan provinsi dan nasional secara terkoordinasi.
5. Evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Bappeda tahun berjalan mengungkap beberapa catatan penting yang menjadi dasar rasional Perubahan RENJA Tahun 2025, antara lain:
 - a. Kurangnya sinergi dalam pelaksanaan program lintas perangkat daerah;
 - b. Belum optimalnya utilisasi data dan hasil evaluasi dalam penyusunan perencanaan tahunan;
 - c. Rendahnya adopsi hasil kajian dan riset dalam kebijakan publik; dan
 - d. Minimnya integrasi inovasi daerah dalam siklus kebijakan perencanaan.

Perubahan RENJA 2025 diarahkan untuk merespons hal-hal tersebut dengan pendekatan perencanaan berbasis kinerja, data, dan inovasi.

Dengan memperhatikan keterkaitan antar dokumen perencanaan di atas, Perubahan RENJA Bappeda Tahun 2025 diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh peran dan fungsi Bappeda sebagai *enabler* transformasi tata kelola, pusat integrasi kebijakan pembangunan, dan pengungkit inovasi kebijakan dapat dijalankan secara lebih efektif, terukur, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor Seri);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor);
19. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 97);
20. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 53);
21. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor);
22. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor);
23. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor);
24. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupten Mojokerto Nomor : 188.4/28/416–201/2024 Tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Periode 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, Dan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
25. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupten Mojokerto Nomor : 188.4/ /416–201/2025 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025;
2. Sebagai perubahan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
3. Sebagai sarana pengendalian perubahan program dan kegiatan tahun 2025; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen P-Renja Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan P-APBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang P-Renja OPD, proses penyusunan P-Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara P-Renja dengan dokumen P-RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjut proses penyusunan P-APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan P-Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan P-Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Membandingkan antara rancangan P-RKPD dengan Analisis Kebutuhan.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemaangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN BERKENAAN

Memasuki periode awal transisi dari Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026 ke Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029, keberjalanan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Mojokerto pada Triwulan I Tahun 2025 menjadi cerminan awal terhadap efektivitas sistem perencanaan dan kesiapan kelembagaan dalam mengakselerasi agenda-agenda prioritas pembangunan daerah. Evaluasi ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja formal semata, melainkan juga menjadi bagian dari proses pembelajaran kelembagaan (*institutional learning*) guna memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan berjalan secara adaptif, berbasis data, dan selaras dengan mandat strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD.

Sebagai institusi perencanaan daerah, Bappeda memiliki peran fundamental dalam membangun tata kelola pembangunan yang berbasis *evidence* dan kolaboratif. Oleh karena itu, evaluasi atas pelaksanaan Renja hingga Triwulan I ini perlu diletakkan dalam kerangka yang tidak hanya menyoroti capaian indikator, tetapi juga menganalisis kualitas pelaksanaan kegiatan, ketepatan penyerapan anggaran, keberfungsian koordinasi lintas perangkat daerah, serta efektivitas peran Bappeda dalam menjalankan fungsi strategisnya sebagai pengarah kebijakan pembangunan daerah.

Tantangan yang dihadapi pada awal tahun anggaran 2025 juga tidak terlepas dari berbagai dinamika eksternal yang turut memengaruhi irama pelaksanaan program. Perubahan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah pasca transisi pemerintahan serta proses harmonisasi sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi (SIPD) yang terus berjalan menjadi faktor-faktor penting yang memberi warna dalam pelaksanaan program-program perencanaan, pengendalian, dan inovasi pembangunan daerah.

Lebih dari itu, aspek-aspek kelembagaan seperti alur komunikasi antar bidang dalam internal Bappeda, pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung sistem kerja, serta responsivitas terhadap dinamika kebutuhan lintas sektor juga merupakan elemen penting dalam evaluasi kinerja triwulan ini. Kinerja bukan semata angka dalam indikator, tetapi mencerminkan kapasitas institusi dalam membangun konektivitas kerja yang cerdas, strategis, dan transformatif.

Dengan demikian, bab hasil evaluasi ini disusun untuk:

1. Memberikan gambaran objektif atas pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Mojokerto sampai dengan Triwulan I Tahun 2025;
2. Mengidentifikasi capaian indikator kinerja utama dan penunjang, serta potensi deviasi terhadap target tahunan;
3. Menganalisis hambatan substantif dan teknis dalam pelaksanaan kegiatan, serta mengajukan rencana tindak lanjut perbaikan;

4. Menyediakan dasar pengambilan keputusan bagi penyesuaian strategi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya;
5. Memperkuat prinsip *evidence-based evaluation* dalam membangun siklus perencanaan yang adaptif dan akuntabel.

Secara menyeluruh, evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemutakhiran arah kerja Bappeda secara taktis maupun strategis, serta memperkuat posisi kelembagaan dalam memastikan terwujudnya tata kelola pembangunan daerah yang transparan, responsif, dan berorientasi hasil nyata.

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I

Pada Subbab ini, dokumen perencanaan yang menjadi acuan evaluasi adalah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan pada tahun 2024 dengan mempedomani dokumen Reviu Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 yang ditetapkan pada Desember 2023. Adapun pada dokumen Reviu Renstra Bappeda tahun 2021-2026 dirumuskan bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto dengan Indikatornya Nilai SAKIP dengan target yang dicanangkan adalah memperoleh Nilai (A). Selanjutnya, untuk sasaran strategis yang hendak dicapai adalah Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indikatornya ada tiga, yaitu Persentase Kinerja Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah; Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah. Adapun target dari masing-masing indikator tersebut adalah 100%.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang meliputi:

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Memfasilitasi keterpaduan dan keselarasan perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah;
4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
5. Menyediakan data serta informasi perencanaan pembangunan;
6. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
7. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Upaya Bappeda dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
- b. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
- c. Terselenggaranya forum Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah;
- d. Meningkatnya konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan serta antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
- e. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi dalam rangka perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto; dan
- f. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan, pengendalian, inovasi di tingkat Kabupaten Mojokerto oleh Bappeda dengan Perangkat Daerah terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat;
2. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan;
3. Tersedianya hasil-hasil kajian/penelitian;
4. Fasilitasi berbagai forum *multi-stakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
5. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang sinergis, dan terpadu; dan
6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Tercapainya tindakan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

- c. Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang terbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi periode pelaksanaan triwulan I tahun 2025 Renja Bappeda Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Pearngkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)								Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV		I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		22		23		24
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R			
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel		Nilai SAKIP PD(nilai)					84 (A)																							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
2		[PROGRAM] 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)	#####		#####		84,00	6.992.237.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.464.131,00	0,00	459.041.520,00	0,00	0,00	0	0	0,00	2.025.505.651,00	#####		11,54	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)	110.000.000,00		41.000.811,00	100,00	7.497.690,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0	0,00	600000	0,00	0	0,00	0	25,00	600.000,00	41.600.811,00		37,82	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)		
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)				3,00	3.748.845,00	0,00		0,00		3,00		0,00		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)		
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)				11,00	3.748.845,00	4,00		3,00		2,00		2,00		4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)		
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(persen)				90,50																								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
2		[PROGRAM] 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG	Persentase Realisasi Anggaran(%)	#####		#####	84,00	6.992.237.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.464.131,00	0,00	459.041.520,00	0,00	0,00	0	0	0,00	2.025.505.651,00	#####		11,54	Badan Perencanaan Pembangunan	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)								Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							I		II		III		IV		I		II		III		IV											
							K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		22		23		24
		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		unan Daerah (bappeda)	
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran(%)		##### ####		##### ####	90,5	6.303.647.000,00	20,00	0,0	25,00	0,0	25,00	0,0	20,50	0,0	17,66	1479599524	0,0	436395341	0,0	0	0,0	0	17,66	1.915.994.865,00		##### ####		62,35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					36,00	6.303.647.000,00									35,00	1.479.599.524,00	0,0	436.395.341,00	0,0	0,0	0,0	0,0	35,00	1.915.994.865,00				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)		1.072.890.000,00		349.507.750,00	85,90		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,90	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,00		349.507.750,00		32,58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)		##### ####		1.653.876.158,00	100,00	293.853.232,00	25,00	0,0	25,00	0,0	25,00	0,0	25,00	0,0	15,60	31288675	0,0	5050000	0,0	0	0,0	0	15,60	36.338.675,00		1.690.214.833,00		13,27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1,00	50.283.856,00	0,0		0,0		0,0		1,00		0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12,00	25.000.000,00	4,0		4,0		4,0		4,00		0,0	0,00	0,0	4.400.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	4.400.000,00					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4,00	28.650.983,00	0,0		1,0		2,0		1,00		0,0	7.170.000,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	7.170.000,00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)					4,00	5.250.000,00	1,0		1,0		1,0		1,00		1,0	1.950.000,00	0,0	650.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2.600.000,00					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					6,00	145.000.000,00	0,0		2,0		2,0		2,00		0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)								Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab						
							I		II		III		IV		I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		22		23		24
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R			
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)					12,00	9.668.393,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00						Badan Perencanaan an Pembangunan Daerah (bappeda)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12,00	30.000.000,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	22.168.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	22.168.675,00					Badan Perencanaan an Pembangunan Daerah (bappeda)	
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)	1.046.061.134,00		541.560.609,00		100,00	197.500.000,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	37544062	0,00	12496049	0,00	0	0,00	0	25,00	50.040.111,00		591.600.720,00		56,56	Badan Perencanaan an Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)					12,00	24.000.000,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	3.504.981,00	0,00	1.149.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4.654.670,00					Badan Perencanaan an Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12,00	173.500.000,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	34.039.081,00	0,00	11.346.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	45.385.441,00					Badan Perencanaan an Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)	1.829.626.447,00		1.242.878.675,15		100,00	189.739.950,00		0,00		0,00		0,00		0,00	11,00	18031870	0,00	4500130	0,00	0	0,00	0	11,00	22.532.000,00		1.265.410.675,15		69,16	Badan Perencanaan an Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)					40,00	95.044.892,00	7,00		10,00		11,00		12,00		7,00	6.031.870,00	0,00	500.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6.532.000,00					Badan Perencanaan an Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					3,00	69.765.058,00	0,00		1,00		1,00		1,00		0,00	12.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00					Badan Perencanaan an Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					6,00	24.930.000,00	0,00		2,00		2,00		2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Badan Perencanaan an Pembangunan Daerah (bappeda)	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)								Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							I		II		III		IV		I		II		III		IV											
							K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		22		23		24
		atau Bangunan Lainnya		K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R			
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel		IP ASN PD(nilai)					85,90																							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
2		[PROGRAM] 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IP ASN(nilai)		#####		#####	84,00	6.992.237.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.464.131,00	0,00	459.041.520,00	0,00	0,00	0	0	0,00	2.025.505.651,00		#####		11,54	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)		1.072.890.000,00		349.507.750,00	85,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		349.507.750,00		32,58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)		#####		1.653.876.158,00	100,00	293.853.232,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	15,60	31288675	0,00	5050000	0,00	0	0,00	0	15,60	36.338.675,00		1.690.214.833,00		13,27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4,00	28.650.983,00	0,00		1,00		2,00		1,00		0,00	7.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170.000,00					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)					4,00	5.250.000,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	1.950.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.600.000,00					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
1	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)					2,00																								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
2		[PROGRAM] 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)		#####		#####	84,00	6.992.237.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.464.131,00	0,00	459.041.520,00	0,00	0,00	0	0	0,00	2.025.505.651,00		#####		11,54	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)								Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							I		II		III		IV		I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		22		23		24
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R			
		KABUPATEN/KOTA																														
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)		110.000.000,00		41.000.811,00	100,00	7.497.690,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0	0,00	600000	0,00	0	0,00	0	25,00	600.000,00		41.600.811,00		37,82	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (bappeda)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3,00	3.748.845,00	0,00		0,00		3,00		0,00		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (bappeda)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					11,00	3.748.845,00	4,00		3,00		2,00		2,00		4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00						Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (bappeda)	
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan pembangunan daerah(persen)					100,00																							Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (bappeda)	
2		[PROGRAM] 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah(%)		5.094.840.611,00		3.508.303.979,00	100,00	1.207.519.708,00	25,00	0,00	25,00	0,00	40,00	0,00	10,00	0,00	17,00	239.903.922,00	0,00	97.514.737,00	0,00	0,00	0	0	17,00	337.418.659,00		3.845.722.638,00		75,48	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Kesesuaian sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan target prioritas; indikator makro dan target ; Isu Strategis antar dokumen perencanaan daerah dengan dokren instansi vertikal(%)		4.383.540.811,00		2.956.939.127,00	100,00	1.059.269.908,00	25,00	0,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	25,00	227227422	0,00	96265737	0,00	0	0,00	0	25,00	323.493.159,00		3.280.432.286,00		74,84	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota(Berita Acara)	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota(Berita Acara)					2,00	444.172.308,00	1,00		1,00		0,00		0,00		1,00	23.920.000,00	0,00	82.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	106.224.000,00					Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)					3,00	615.097.600,00	0,00		0,00		3,00		0,00		0,00	203.307.422,00	0,00	13.961.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.269.159,00					Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (bappeda)

N o	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)								Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penangu ng Jawab						
							I		II		III		IV		I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		22		23		24
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R			
		[PROGRAM] 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIA N DAN EVALUASI PEMBANGUNA N DAERAH	Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah(%)					100,00		?								17		0,00		0,00		0								
3		[KEGIATAN] 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan(%)		597.996.800,00		401.828.202,00	100,00	77.724.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	11631500	0,00	1249000	0,00	0	0,00	0	0,00	12.880.500,00		414.708.702,00		69,35	Badan Perencana an Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan(Lapora n)					1,00	27.501.300,00	0,00		0,00		0,00		1,00		0,00	0,00	0,00	1.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.000,00					Badan Perencana an Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah(Laporan)					1,00	50.223.500,00	0,00		0,00		0,00		1,00		0,00	11.631.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.631.500,00						Badan Perencana an Pembangunan Daerah (bappeda)
		[PROGRAM] 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik(%)					100,00		?								25		0,00		0,00		0								
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang PPM(%)		261.232.642,00		4.146.533.541,00	100,00	619.520.438,00	25,00	0,00	24,00	0,00	40,00	0,00	10,00	0,00	25,00	144103500	0,00	97107000	0,00	0	0,00	0	25,00	241.210.500,00		4.387.744.041,00		1.679,63	Badan Perencana an Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan(Lapora n)					2,00	8.846.700,00	0,00		1,00		1,00		0,00		0,00	1.920.000,00	0,00	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560.000,00					Badan Perencana an Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPKD/RPJMD pada					4,00	195.370.200,00	0,00		0,00		3,00		1,00		0,00	11.700.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.500,00						Badan Perencana an Pembangunan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)								Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							I		II		III		IV		I		II		III		IV											
							K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		22		23		24
		Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bidang Pemerintahan(Laporan)	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		unan Daerah (bappeda)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Pembangunan Manusia(Laporan)					10,00	415.303.538,00	1,00		2,00		4,00		3,00		1,00	130.483.000,00	0,00	93.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	223.950.000,00				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang PSDA(%)		337.057.960,00		2.951.781.042,00	100,00	632.681.250,00	25,00	0,00	25,00	0,00	40,00	0,00	10,00	0,00	25,00	24873900	0,00	999000	0,00	0	0,00	0	25,00	25.872.900,00		2.977.653.942,00		883,42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					2,00	3.700.000,00	0,00		1,00		1,00		0,00		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Perencanaan(Laporan)					3,00	293.824.000,00	0,00		0,00		0,00		3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					2,00	14.518.400,00	0,00		1,00		1,00		0,00		0,00	2.442.500,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441.500,00					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang SDA(Laporan)					3,00	233.419.000,00	0,00		0,00		0,00		3,00		0,00	13.961.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.961.400,00					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)								Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							I		II		III		IV		I		II		III		IV											
							K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		22		23		24
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R			
		Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																														
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang IW(%)		2.651.613.437,00		2.240.730.456,00	100,00	1.089.502.450,00	25,00	0,00	25,00	0,00	40,00	0,00	10,00	0,00	25,00	69567000	0,00	68001485	0,00	0	0,00	0	25,00	137.568.485,00		2.378.298.941,00		89,69	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)				2,00	15.922.500,00	0,00		1,00		1,00		0,00		0,00	7.520.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745.000,00					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur(Laporan)				7,00	723.579.950,00	0,00		2,00		2,00		3,00		0,00	32.871.000,00	0,00	21.166.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.037.485,00					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan(Laporan)				2,00	350.000.000,00	0,00		0,00		0,00		2,00		0,00	29.176.000,00	0,00	45.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.786.000,00					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
2		[PROGRAM] 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik(%)		#####		9.339.045.039,00	100,00	2.341.704.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	17,00	238.544.400,00	0,00	166.107.485,00	0,00	0,00	0	0	17,00	404.651.885,00		9.743.696.924,00		87,42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PPM(%)		261.232.642,00		4.146.533.541,00	100,00	619.520.438,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	144103500	0,00	97107000	0,00	0	0,00	0	0,00	241.210.500,00		4.387.744.041,00		1.679,63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang				2,00	8.846.700,00	0,00		1,00		1,00		0,00		0,00	1.920.000,00	0,00	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560.000,00					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)								Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							I		II		III		IV		I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		22		23		24
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R			
		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pemerintahan(Laporan)																													
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan(Laporan)			4,00	195.370.200,00	0,00		0,00		3,00		1,00		0,00	11.700.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.500,00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia(Laporan)			10,00	415.303.538,00	1,00		2,00		4,00		3,00		1,00	130.483.000,00	0,00	93.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	223.950.000,00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik PPM(%)		261.232.642,00		4.146.533.541,00	100,00	619.520.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	17,00	144103500	0,00	97107000	0,00	0	0,00	0	17,00	241.210.500,00		4.387.744.041,00		1.679,63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan(Laporan)					2,00	8.846.700,00	0,00		1,00		1,00		0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560.000,00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan(Laporan)			4,00	195.370.200,00	0,00		0,00		3,00		1,00		0,00	11.700.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.500,00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)		
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia(Laporan)			10,00	415.303.538,00	1,00		2,00		4,00		3,00		1,00	130.483.000,00	0,00	93.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	223.950.000,00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)								Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							I		II		III		IV		I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		22		23		24
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PSDA(%)		337.057.960,00		2.951.781.042,00	100,00	632.681.250,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	24873900	0,00	999000	0,00	0	0,00	0	0,00	25.872.900,00		2.977.653.942,00		883,42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan(Laporan)				4,00		87.219.850,00	0,00		1,00		1,00		2,00		0,00	7.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870.000,00					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik PSDA(%)		337.057.960,00		2.951.781.042,00	100,00	632.681.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	17,00	24873900	0,00	999000	0,00	0	0,00	0	17,00	25.872.900,00		2.977.653.942,00		883,42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan(Laporan)				4,00		87.219.850,00	0,00		1,00		1,00		2,00		0,00	7.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870.000,00					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik IW(%)		2.651.613.437,00		2.240.730.456,00	100,00	1.089.502.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	17,00	69567000	0,00	68001485	0,00	0	0,00	0	17,00	137.568.485,00		2.378.298.941,00		89,69	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)				2,00		15.922.500,00	0,00		1,00		1,00		0,00		0,00	7.520.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745.000,00					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang IW(%)		2.651.613.437,00		2.240.730.456,00	100,00	1.089.502.450,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	69567000	0,00	68001485	0,00	0	0,00	0	137.568.485,00		2.378.298.941,00		89,69	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)								Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							I		II		III		IV		I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		22		23		24
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R			
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					2,00	15.922.500,00	0,00		1,00		1,00		0,00		0,00	7.520.000,00	0,00		1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745.000,00				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah(persen)					100,00																							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
		[PROGRAM] 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan(%)					100,00		?						17		0,00		0,00		0										
3		[KEGIATAN] 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan(%)		100.000.000,00		149.536.650,00	100,00	70.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1045000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.045.000,00		150.581.650,00		150,58		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)(Dokumen)					1,00	70.525.000,00	0,00		0,00		0,00	1,00		0,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah(persen)					100,00																							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
2		[PROGRAM] 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah(%)		1.887.052.250,00		1.517.890.082,00	100,00	294.675.850,00	0,00	0,00	65,00	0,00	20,00	0,00	15,00	0,00	7.861.500,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	10.711.500,00		1.528.601.582,00		81,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil-Hasil Riset yang difasilitasi(%)		223.702.387,00		179.575.529,00	100,00	294.675.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	7861500	0,00	2850000	0,00	0	0,00	0	0,00	10.711.500,00		190.287.029,00		85,06		Badan Perencanaan Pembangunan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)								Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							I		II		III		IV		I		II		III		IV												
							K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		22		23		24	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	Daerah (bappeda)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Bidang Teknologi dan Inovasi(Dokumen)					1,00	178.892.800,00	0,00		0,00		0,00		1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan(Laporan)					1,00	115.783.050,00	0,00		0,00		0,00		1,00		0,00	7.861.500,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711.500,00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
	[Target Capaian Sub Kegiatan]																									14,63 %							
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4																												
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	1. Terdapat kegiatan yang harus dilaksanakan pada TW I sehingga menjadi pendorong utk realisasi target kinerja dan anggaran. 2. Telah dilaksanakan serangkaian proses perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan daerah maupun OPD sejak akhir tahun 2024 serta di awal tahun 2025.																															
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	1. Belum semua OPD mengirimkan dokumen perencanaan dan laporannya tepat waktu untuk dilaksanakan verifikasi 2. Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan yang belum optimal 3. Belum optimalnya peran OPD dalam perumusan judul/tema kajian (berbeda yang datang rapat dengan yg memang membutuhkan) 4. Belum optimalnya peran OPD dalam input data inovasi 5. Adanya efisiensi belanja pada APBD 2025 sehingga harus merubah prioritas pelaksanaan subkegiatan yang berdampak pada proses pelaksanaan kegiatan																															
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan semua OPD 2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi utk percepatan proses bisnis 3. melaksanakan koordinasi dan dialog untuk membahas tidak hanya ketersediaan/ketercukupan data saja namun juga pada aspek validitas dan relevansi data tsb. 4. Pengoptimalan evaluasi thdp inovasi-inovasi yang sudah memiliki nilai optimal (Amati Tiru Modifikasi) 5. pengoptimalan penggunaan Sumber Daya (manusia, peralatan, dan anggaran) dalam pencapaian target/output kegiatan 6. Optimalisasi identifikasi persoalan dalam perumusan judul/tema kajian melalui koordinasi secara intensif																															
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	1. semua kegiatan yang dilaksanakan di TW I tahun 2025 sudah sesuai target yang telah di tentukan, dan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan TW II tahun 2025. 2. Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan																															

Untuk penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Mojokerto tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian Triwulan I tahun 2025. Tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan serta hambatan/permasalahan dan faktor pendorong yang dihadapi.

Berdasarkan Tabel 2.1 (Formulir E-81/ Evaluasi Hasil Renja Triwulan I Tahun 2025) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, secara total untuk capaian kinerja sebesar 15,19 % dan untuk anggaran sebesar 17,66%. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto. Adapun Indikatornya adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah (84,00 : A); Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (90,50%); Indeks Profesionalitas ASN (85,90%); dan Jumlah Inovasi yang terinternalisasikan dan tersosialisasi serta berkelanjutan (2 Inovasi). Terkait dengan Indikator Program yang sudah ditetapkan, capaiannya pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut: SAKIP Perangkat Daerah, belum dilaksanakan penilaian; Realisasi Anggaran Perangkat Daerah sebesar 20,37%; Indeks Profesionalitas ASN belum keluar nilainya karena evaluasi baru dilaksanakan pada triwulan IV; serta Inovasi yang terinternalisasikan dan tersosialisasi serta berkelanjutan berjumlah 2 Inovasi belum diinput pada website Kemendagri karena baru dilaksanakan pada Triwulan III.

Program ini terdiri atas 5 (lima) Kegiatan dengan 15 Subkegiatan dengan Alokasi Anggaran totalnya sebesar Rp. 7.228.710.500. Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 1.566.464.131. atau sebesar 21,67% dari total anggaran.

Adapun Realisasi Anggaran serta Capaian Kinerja Kegiatan pada Program ini terdeskripsikan sebagai berikut:

I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada kegiatan ini terdapat 2 subkegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Adapun realisasi anggaran pada 2 subkegiatan adalah sebesar 0% dengan Pencapaian Indikator yaitu 2 Dokumen Perencanaan baru tersusun pada triwulan III. Adapun untuk 9 Laporan Evaluasi Kinerja baru tercapai berupa Laporan LKjIP, LKPJ, dan LPPD. Capaian realisasi anggaran pada Triwulan I masih 0% sesuai dengan perencanaan arus kas pada awal tahun dimana proses realisasi atau pencairan keuangan baru dimulai pada Triwulan II.

II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, realisasi anggarannya sebesar 23,47% dengan realisasi Capaian Kinerja yaitu terpenuhinya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 35 orang.

Capaian kinerja tersebut tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pada awal tahun yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 36 orang dikarenakan beberapa ASN yang purna tugas serta mutasi keluar Bappeda sejak tahun sebelumnya tidak ada penggantinya. Adapun strategi yang diterapkan untuk mengatasinya adalah tengah menunggu

proses pengangkatan CPNS/PPPK yang seleksinya diadakan pada tahun 2024, namun untuk pelaksanaannya masih menunggu informasi dan pengumuman dari KemenPANRB dan BKN.

III. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, realisasi anggarannya sebesar 6,38% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang Tercapai sebesar 100%. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan triwulan I yaitu 15,60%. Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari 7 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Subkegiatan Penyediaan Bahan / Material, Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dan Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Beberapa subkegiatan kurang optimal dikarenakan timeline pelaksanaannya yang baru akan dijalankan pada triwulan II hingga IV seperti pelaksanaan penyediaan bahan/material alat tulis kantor, penyediaan barang cetak dan penggandaan untuk pengadaan bendera HUT RI serta publikasi di Media Massa, serta adanya kebijakan untuk pembatasan kegiatan perjalanan dinas bagi instansi pemerintah.

IV. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi anggarannya sebesar 19,01% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan sebesar 100%. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan triwulan I adalah 25% terpenuhi.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun kinerja fisik dari 2 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik serta Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Tidak ada kendala baik terkait anggaran maupun kinerja pada dua subkegiatan tersebut dikarenakan proses pelaksanaannya bersifat rutin yang memuat pembayaran gaji kepada tenaga administrasi non-ASN serta kebutuhan listrik dan komunikasi berupa telepon.

V. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasinya sebesar 8,12% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik sebesar 100%. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan triwulan I adalah 11%.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari 3 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan antara lain terdapat perbedaan/selisih harga satuan pembelian antara di pasar/lapangan saat pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan standar harga yang tertera pada DPA, timeline pelaksanaan kegiatan yang baru akan dijalankan

pada triwulan II hingga IV seperti pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor (renovasi atap, cat ulang tembok, dll), serta sarana dan prasarana gedung (service AC, printer, dll)

2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas Kinerja Pengendalian Perencanaan Pembangunan daerah serta terwujudnya Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang optimal. Adapun Indikatornya adalah Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (100%), Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan (100%), dan Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan (100%). Terkait dengan Indikator Program yang sudah ditetapkan, capaiannya pada triwulan I adalah masing-masing 17% yang dibuktikan dengan disahkannya 1 Berita Acara Musrenbang yaitu RKPD 2026, evaluasi perencanaan pembangunan periode sebelumnya sebagai dasar penyusunan RPJMD 2025-2029, serta persiapan Forum Satu Data Palapa.

Program ini terdiri atas 3 (tiga) Kegiatan dengan 5 Subkegiatan dengan Alokasi Anggaran totalnya sebesar Rp. 1.339.109.308 dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 239.903.922 atau sebesar 17,92% dari total anggaran.

Adapun Realisasi Anggaran serta Capaian Kinerja Kegiatan pada Program ini terdeskripsikan sebagai berikut:

I. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, realisasi anggarannya sebesar 19,52% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antar dokumen perencanaan daerah dengan dokren instansi vertikal sebesar 100%. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan triwulan I adalah 25% (satu Berita Acara Musrenbang RKPD 2026).

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari 2 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dan Subkegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan antara lain pada aspek potret permasalahan dan isu strategis daerah, pada aspek kolaborasi kinerja antar perangkat daerah, pada aspek tingkat usulan masyarakat yang terakomodir, dan pada aspek sinkronisasi kebijakan pusat, provinsi, dan daerah. Adapun strategi yang sudah diterapkan guna mengatasi kendala tersebut adalah lebih intensif lagi dalam melaksanakan analisis permasalahan dan isu strategis daerah, secara intensif melaksanakan koordinasi antar perangkat daerah guna kolaborasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja baik pada level makro maupun level meso, secara intensif melaksanakan koordinasi/komunikasi dan dialog dengan masyarakat serta pemerintah level desa/kecamatan guna penjangkaran aspirasi, sinkronisasi dg pokir anggota dewan, dan secara aktif berkoordinasi dengan berbagai stakeholder terkait baik perangkat daerah teknis maupun dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka sinkronisasi dan penyelarasan kebijakan serta melaksanakan koordinasi dan dialog untuk membahas tidak hanya ketersediaan/ketercukupan data saja namun juga pada aspek validitas dan relevansi data tersebut.

II. Kegiatan Analisis Data dan Informasi

Pada kegiatan Analisis Data dan Informasi, realisasi anggarannya sebesar 1,39% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase data dan informasi yang relevan dan akurat (100%). Adapun pelaksanaan kegiatannya sesuai timeline baru akan dilaksanakan pada akhir triwulan II hingga triwulan IV sehingga kinerja pada triwulan II masih tercapai 17%.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan adalah pada aspek tingkat ketersediaan data dan informasi yang kemudian berhasil diatasi melalui strategi melaksanakan koordinasi dan dialog untuk membahas tidak hanya ketersediaan/ketercukupan data saja namun juga pada aspek validitas dan relevansi data tersebut.

III. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pada kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, realisasi anggarannya sebesar 11,63% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Capaian Target Kinerja Pemerintah Daerah (100%). Adapun pelaksanaan kegiatannya sesuai timeline baru akan dilaksanakan pada awal triwulan III hingga triwulan IV sehingga kinerja pada triwulan I masih belum tercapai.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan adalah pada aspek peningkatan pendanaan kegiatan dari sumber pendanaan lainnya dan pada aspek pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan monev. Adapun strategi yang sudah diterapkan guna mengatasi kendala tersebut adalah secara aktif berkoordinasi dengan PD terkait juga dengan pihak pemerintah pusat dan provinsi untuk tidak hanya memperoleh DAK namun juga dalam rangka mencari alternatif sumber pendanaan pembangunan lainnya serta optimalisasi sistem informasi terkait pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah melalui aplikasi AKSARA. Selain itu, juga terus mengembangkan aplikasi tersebut agar dapat mengakomodir mandat dari kebijakan/peraturan pemerintah pusat dan provinsi serta daerah.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya keselarasan antar dokumen perencanaan pada level bidang tematik serta terwujudnya capaian target kinerja perencanaan pembangunan bidang/tematik. Adapun indikatornya adalah persentase keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik (100%) serta persentase capaian target kinerja perencanaan pembangunan bidang/tematik (100%). Terkait dengan Indikator Program yang sudah ditetapkan, capaiannya pada Triwulan I adalah 25% dan 17%. Hal tersebut dikarenakan Dokumen Perencanaan Bidang/Tematik baru disahkan pada Triwulan III, begitu pula dengan capaian target kinerja yang sebagian besar baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.

Program ini terdiri atas 3 (tiga) Kegiatan dengan 11 Subkegiatan dengan Alokasi Anggaran totalnya sebesar Rp. 2.698.130.787 dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 238.544.400 atau sebesar 8,84% dari total anggaran.

Adapun Realisasi Anggaran serta Capaian Kinerja Kegiatan pada Program ini terdeskripsikan sebagai berikut:

I. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, realisasi anggarannya sebesar 16,16% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Keselarasan

antar dokumen perencanaan bidang PPM, Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PPM, serta persentase capaian kinerja perencanaan pembangunan bidang PPM. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan Triwulan I adalah 25% dan 17% yang antara lain menggambarkan dari capaian asistensi penyusunan dokumen perencanaan pada Perangkat Daerah bidang PPM, terlaksananya kegiatan Musrenbang Perempuan dan Anak pada bulan Maret 2025, serta beragam kegiatan/rencana aksi yang mendukung pencapaian indikator dan target kegiatan seperti proses koordinasi, sinergi, sinkronisasi dengan para stakeholder baik yang bersifat vertikal (provinsi dan pemerintah pusat) maupun horisontal (perangkat daerah terkait).

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari 3 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, dan Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan antara lain belum semua OPD mengirimkan dokumen perencanaan dan laporannya tepat waktu untuk dilaksanakan verifikasi. Adapun faktor pendorongnya antara lain terdapat kegiatan yang harus dilaksanakan pada TW I sehingga menjadi pendorong untuk realisasi target kinerja dan anggaran serta telah dilaksanakan serangkaian proses perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan daerah maupun OPD sejak akhir tahun 2024 serta di awal tahun 2025.

II. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

Pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA, realisasi anggarannya sebesar 3,35% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang PSDA, Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PSDA, serta persentase capaian kinerja perencanaan pembangunan bidang PSDA. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai Triwulan I adalah 25% dan 17% yang antara lain menggambarkan dari capaian koordinasi dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pada Perangkat Daerah bidang PSDA serta beragam kegiatan/rencana aksi yang mendukung pencapaian indikator dan target kegiatan seperti proses koordinasi, sinergi, sinkronisasi dengan para stakeholder baik yang bersifat vertikal (provinsi dan pemerintah pusat) maupun horisontal (perangkat daerah terkait).

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari 5 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Subkegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan antara lain belum semua OPD mengirimkan dokumen perencanaan dan laporannya tepat waktu untuk dilaksanakan verifikasi

serta adanya pelaksanaan kebijakan efisiensi dan *refocusing* anggaran belanja yang berdampak pada pelambatan proses pelaksanaan kegiatan. Adapun faktor pendorongnya antara lain terdapat kegiatan yang harus dilaksanakan pada TW I sehingga menjadi pendorong untuk realisasi target kinerja dan anggaran serta telah dilaksanakan serangkaian proses perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan daerah maupun OPD sejak akhir tahun 2024 serta di awal tahun 2025.

III. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, realisasi anggarannya sebesar 6,54% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta persentase capaian kinerja perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai Triwulan I adalah 25% dan 17% yang antara lain menggambarkan dari capaian koordinasi dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pada Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, tersusunnya beberapa laporan sinergitas antar dokumen perencanaan di bidang Infrastruktur pada bulan Maret 2025 dalam rangka pemenuhan kelengkapan dokumen untuk pengajuan DAK, serta beragam kegiatan/rencana aksi yang mendukung pencapaian indikator dan target kegiatan seperti proses koordinasi, sinergi, sinkronisasi dengan para stakeholder baik yang bersifat vertikal (provinsi dan pemerintah pusat) maupun horisontal (perangkat daerah terkait) seperti koordinasi dan sinergi dalam rangka finalisasi revisi Peraturan Daerah tentang RTRW.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun kinerja fisik dari 3 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, serta Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan antara lain belum semua OPD mengirimkan dokumen perencanaan dan laporannya tepat waktu untuk dilaksanakan verifikasi serta cukup kompleksnya persoalan yang diidentifikasi saat proses revisi Peraturan Daerah RTRW seperti adanya perbedaan substansi (acuan/pedoman) pada proses perizinan dari Perangkat Daerah Teknis terkait dan adanya perubahan total luas lahan pada beberapa sektor antara lain pertanian dan industri. Adapun faktor pendorongnya antara lain terdapat kegiatan yang harus dilaksanakan pada TW I sehingga menjadi pendorong untuk realisasi target kinerja dan anggaran serta telah dilaksanakan serangkaian proses perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan daerah maupun OPD sejak akhir tahun 2024 serta di awal tahun 2025.

4. Program Penelitian dan Pengembangan

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya terwujudnya kebijakan perencanaan pembangunan yang berbasis riset dan inovasi. Adapun Indikatornya adalah Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah (100%). Terkait dengan Indikator Program yang sudah ditetapkan, capaiannya pada Triwulan I adalah 0%. Kondisi tersebut

sesuai dengan perencanaan pada awal tahun dimana pelaksanaan kegiatan pada program ini sebagian besar bersifat Jasa Konsultansi serta pelaksanaan kegiatan di Triwulan II hingga IV sesuai dengan timeline pelaksanaan *Innovative Government Awards* (IGA) oleh Kementerian Dalam Negeri.

Program ini terdiri atas 1 (satu) Kegiatan dengan 2 Subkegiatan dengan Alokasi Anggaran totalnya sebesar Rp. 355.499.000 dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 7.861.500 atau sebesar 2,21% dari total anggaran.

Adapun Realisasi Anggaran serta Capaian Kinerja Kegiatan pada Program ini terdeskripsikan sebagai berikut:

I. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Tehnologi

Pada kegiatan Pengembangan Inovasi dan Tehnologi, realisasi anggarannya sebesar 2,21% dengan target Capaian Kinerja yaitu persentase hasil-hasil riset yang difasilitasi (100%). Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan Triwulan I adalah 0% dikarenakan kegiatan ini baru dapat diukur ketercapaiannya pada saat proses input inovasi daerah di website Kementerian Dalam Negeri selesai dilakukan dan hasil penilaian terhadap inputan tersebut keluar/diumumkan pada Triwulan IV. Selain itu, pelaksanaan realisasi jasa konsultansi baru dilaksanakan pada Triwulan II hingga III yaitu dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJ-PID) Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu dokumen acuan dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari 2 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi dan Subkegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan. Adapun kendala yang ditemui antara lain belum optimalnya peran OPD dalam input data inovasi serta belum optimalnya proses identifikasi isu-isu pemajuan iptek daerah yang diselaraskan dengan isu strategis pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan.

Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Mojokerto sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memberikan gambaran awal mengenai bagaimana strategi, struktur kelembagaan, serta ekosistem perencanaan daerah mulai bekerja dalam menjawab arah pembangunan tahunan dan jangka menengah. Evaluasi ini menunjukkan adanya perbedaan kemajuan antar program dan kegiatan, yang menjadi dasar penting bagi penguatan fungsi pengendalian serta penyesuaian strategi pelaksanaan pada triwulan berikutnya.

Secara umum, realisasi kinerja Bappeda pada triwulan pertama berada pada tingkat moderat, dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar $\pm 15,19\%$ dan realisasi anggaran sebesar $\pm 17,66\%$. Capaian ini berada dalam tren pelaksanaan awal tahun anggaran yang umumnya dipengaruhi oleh fase transisi pengadaan, penyesuaian regulasi, serta pelaksanaan kegiatan yang direncanakan lebih dominan di triwulan II ke atas. Namun demikian, terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat ditarik dari analisis per-program dan kegiatan:

1. Keberhasilan awal tercermin pada program-program pendukung manajemen pemerintahan, seperti kegiatan administrasi keuangan dan kepegawaian, yang realisasi anggarannya relatif

tinggi. Ini mengindikasikan bahwa fungsi administratif dan dukungan internal kelembagaan berjalan dengan baik sebagai fondasi organisasi.

2. Capaian kinerja teknis perencanaan seperti koordinasi penyusunan dokumen, pelaksanaan Musrenbang, evaluasi dokumen perencanaan tematik, dan asistensi OPD telah menunjukkan progres awal yang positif, meskipun baru sebagian indikator yang dapat terverifikasi secara penuh.
3. Beberapa program seperti penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, belum menunjukkan capaian kinerja karena karakteristik pelaksanaannya yang bersifat jasa konsultansi dan terjadwal pada triwulan II hingga IV. Hal ini sesuai dengan rencana kerja dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlambatan atau deviasi negatif.
4. Hambatan pelaksanaan umumnya disebabkan oleh kendala non-substantif, seperti:
 - a. jadwal pelaksanaan yang memang direncanakan pada triwulan selanjutnya (misalnya pemeliharaan aset dan pelaporan kinerja);
 - b. belum optimalnya input dan umpan balik dari OPD mitra kerja BAPPEDA, terutama dalam hal penyampaian dokumen tepat waktu dan ketersediaan data yang valid; serta
 - c. faktor eksternal seperti keterbatasan sumber daya manusia, pengaruh pengaturan kas daerah, dan kebijakan *refocusing* anggaran.
5. Beberapa faktor pendorong keberhasilan awal meliputi:
 - a. Tersedianya rancangan awal dokumen perencanaan tahunan sejak akhir tahun sebelumnya;
 - b. terbentuknya forum koordinasi dengan OPD sejak awal tahun; serta
 - c. kuatnya agenda strategis kelembagaan, seperti pelaksanaan Musrenbang RKPD dan asistensi penyusunan RPJMD, yang mempercepat dinamika perencanaan lintas bidang.

Dari hasil evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Renja Bappeda sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 telah berjalan dalam koridor yang dirancang, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan di tingkat operasional. Kinerja organisasi menunjukkan bahwa Bappeda mampu menjaga kesinambungan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan, meskipun beberapa peran kunci seperti pemanfaatan data analitik dan riset kebijakan masih memerlukan penguatan pada periode berikutnya.

Oleh karena itu, kesimpulan utama dari evaluasi ini adalah bahwa struktur pelaksanaan program/kegiatan telah berada pada jalur yang relatif sesuai, namun efektivitas pelaksanaannya akan sangat ditentukan oleh penguatan koordinasi lintas OPD dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat kolaboratif; optimalisasi pemanfaatan data, evaluasi, dan hasil kajian sebagai dasar kebijakan; serta kesinambungan pelaksanaan program lintas triwulan dengan pengawasan yang lebih responsif.

Hasil evaluasi ini menjadi pijakan penting untuk melakukan penyesuaian strategis pada Triwulan II dan seterusnya, serta akan menjadi bagian integral dalam proses pengendalian Renja, pelaporan kinerja, dan penyusunan dokumen perencanaan berikutnya yang merupakan tahun permulaan dari periode lima tahunan dalam siklus pertama Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

2.2 Review terhadap P-RKPD

Penyusunan Perubahan Renja mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) 2025. Penyusunan Perubahan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan P-RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Perubahan APBD. Rencana Kerja perubahan Bappeda Kabupaten Mojokerto merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA) perubahan.

Dokumen P-RKPD 2025, dalam penyusunannya tidak terlepas dari Evaluasi Terhadap Kinerja Triwulan I Tahun berjalan serta mempedomani Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Hasil evaluasi dan telaah tersebut kemudian menjadi dasar dalam urgensi penyusunan P-RKPD. Sebagaimana tertuang dalam Bab II dokumen P-RKPD tentang Identifikasi Permasalahan Pembangunan, untuk urusan Perencanaan Pembangunan terdapat beberapa masalah pokok, antara lain:

1. Sinergi pelaksanaan program kegiatan di Perangkat Daerah kurang optimal;
2. Belum optimalnya penyediaan data terbaru dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program pembangunan dalam perbaikan perencanaan;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai acuan perencanaan pembangunan; dan
5. Belum optimalnya peran OPD dalam peningkatan Inovasi Daerah.

Ragam permasalahan tersebut juga tergambar dari temuan/analisa kinerja baik dari aspek anggaran maupun dari aspek capaian subkegiatan/kegiatan/program di Bappeda sebagaimana tertuang pada Sub-BAB 2.1.

Selain mengacu pada Kinerja Triwulan I tahun berjalan, dimensi ekonomi daerah juga menjadi pertimbangan utama dalam perumusan P-RKPD. Poin yang menjadi perhatian tentunya adalah strategi dalam mengurangi tekanan terhadap defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian daerah.

Intervensi kebijakan pada dimensi ekonomi tentunya tidak bisa terlepas dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kapasitas keuangan daerah merupakan faktor fundamental dalam menunjang pengelolaan keuangan daerah dalam rangka menggambarkan seberapa besar tingkat

kemandirian Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah serta melaksanakan tugas-tugas pembantuan sesuai prinsip otonomi daerah. Kapasitas keuangan daerah tersebut menjadi faktor penentu arah kebijakan belanja dan pembiayaan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Berdasarkan amanat tersebut, maka alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya dan dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta dalam rangka pelaksanaan kebijakan perencanaan Pembangunan daerah yang selaras, efektif, efisien, dan berorientasi hasil, maka Bappeda melakukan penyesuaian pada program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan pada sisa tahun berjalan 2025. Penyesuaian tersebut tentunya dengan mengacu pada hasil evaluasi terhadap Kinerja hingga Triwulan I tahun 2025 baik dari aspek anggaran maupun dari aspek capaian subkegiatan/kegiatan/program. Penyesuaian yang dilakukan kemudian dituangkan dalam langkah konkret berupa penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran yang ada di Bappeda yang diatur sesuai dengan skala prioritas sebagaimana tertuang pada Tabel 2.2 seperti dibawah ini.

Tabel 2.2 (Tabel T-C.31 pada pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)

Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025

Kabupaten Mojokerto

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025						RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BAPPEDA 2025					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,00 (A)	8.074.896.804			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,00 (A)	8.074.896.804		
	Persentase Realisasi Anggaran	90,50%					Persentase Realisasi Anggaran	90,50%			
	IP ASN	85,90					IP ASN	85,90			
	Jumlah inovasi yang memenuhi 20 Indikator Indeks Inovasi Daerah Kemendagri	2 Inovasi					Jumlah inovasi yang memenuhi 20 Indikator Indeks Inovasi Daerah Kemendagri	2 Inovasi			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Bappeda	100%	12.000.000			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Bappeda	100%	12.000.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	7.500.000			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	7.500.000		
Rincian :						Rincian :					
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			525	Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen perencanaan PD meliputi dokumen RENSTRA, RENJA 2026, dan P-RENJA 2025		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			525	Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen perencanaan PD meliputi dokumen RENSTRA, RENJA 2026, dan P-RENJA 2025	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			3.021.975			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			3.021.975		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1.977.500			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1.977.500		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.500.000			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.500.000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 laporan	4.500.000			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 laporan	4.500.000		
Rincian :						Rincian :					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025						RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BAPPEDA 2025					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			3.000	Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja PD meliputi dokumen LKjIP, LPPD, LKPJ, SAKIP, Evaluasi Kinerja 3 bulanan, RMRB, SKM, dan Evaluasi Renstra 2021-2026		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			3.000	Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja PD meliputi dokumen LKjIP, LPPD, LKPJ, SAKIP, Evaluasi Kinerja 3 bulanan, RMRB, SKM, dan Evaluasi Renstra 2021-2026	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			-			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			-		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			4.497.000			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			4.497.000		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			-			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			-		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran yang tercapai	90,50 %	6.303.647.000			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran yang tercapai	90,50 %	6.303.647.000		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/bulan	6.303.647.000			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/bulan	6.303.647.000		
Rincian :						Rincian :					
Belanja gaji pokok PNS			1.981.847.000	Digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN		Belanja gaji pokok PNS			1.981.847.000	Digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN	
Belanja Gaji Pokok PPPK			32.036.000			Belanja Gaji Pokok PPPK			32.036.000		
Belanja Tunjangan Keluarga PNS			195.880.000			Belanja Tunjangan Keluarga PNS			195.880.000		
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			4.486.000			Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			4.486.000		
Belanja Tunjangan Jabatan PNS			112.768.000			Belanja Tunjangan Jabatan PNS			112.768.000		
Belanja Tunjangan Fungsional PNS			231.173.000			Belanja Tunjangan Fungsional PNS			231.173.000		
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			38.499.000			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			38.499.000		
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			1.850.000			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			1.850.000		
Belanja Tunjangan Beras PNS			111.238.000			Belanja Tunjangan Beras PNS			111.238.000		
Belanja Tunjangan Beras PPPK			2.897.000			Belanja Tunjangan Beras PPPK			2.897.000		
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			14.669.000			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			14.669.000		
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			500.000			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			500.000		
Belanja Pembulatan Gaji PNS			228.000			Belanja Pembulatan Gaji PNS			228.000		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025						RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BAPPEDA 2025					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Pembulatan Gaji PPPK			50.000			Belanja Pembulatan Gaji PPPK			50.000		
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			4.757.000			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			4.757.000		
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			77.000			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			77.000		
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			14.270.000			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			14.270.000		
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			231.000			Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			231.000		
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			9.910.000			Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			9.910.000		
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			161.000			Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			161.000		
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			2.480.320.000			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			2.480.320.000		
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS			972.800.000			Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS			972.800.000		
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			93.000.000			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			93.000.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai	100%	1.139.775.404			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai	100%	1.139.775.404		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	813.868.528			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	813.868.528		
Rincian :						Rincian :					
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			28.571.400	- Pengadaan AC Lantai 2 Rp.36.280.572 - Pengadaan Videotron+Audio Rp.727.304.100		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			28.571.400	- Pengadaan AC Lantai 2 Rp.36.280.572 - Pengadaan Videotron+Audio Rp.727.304.100	
Belanja Modal Peralatan Studio Audio			35.215.600			Belanja Modal Peralatan Studio Audio			35.215.600		
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			2.020.000			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			2.020.000		
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya			341.900			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya			341.900		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025						RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BAPPEDA 2025					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Modal Alat Pendingin			36.280.572			Belanja Modal Alat Pendingin			36.280.572		
Belanja Modal Personal Computer			39.286.500			Belanja Modal Personal Computer			39.286.500		
Belanja Modal Peralatan Personal Computer			14.430.588			Belanja Modal Peralatan Personal Computer			14.430.588		
Pembulatan			4.155			Pembulatan			4.155		
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film			657.020.400			Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film			657.020.400		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			697.413			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			697.413		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 paket	25.000.000			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 paket	25.000.000		
Rincian :						Rincian :					
Belanja makanan dan minuman rapat			25.000.000	Digunakan untuk belanja makanan dan minuman rapat sebagaimana pada rincian belanja		Belanja makanan dan minuman rapat			25.000.000	Digunakan untuk belanja makanan dan minuman rapat sebagaimana pada rincian belanja	
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	53.488.483			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	53.488.483		
Rincian :						Rincian :					
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			6.060.000	- Belanja Cetak dan Bendera Agustusan Rp. 14.837.500 - Keperluan Media Massa Rp.10.000.000		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			6.060.000	- Belanja Cetak dan Bendera Agustusan Rp. 14.837.500 - Keperluan Media Massa Rp.10.000.000	
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			0			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			0		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			26.077.150			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			26.077.150		
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			21.350.628			Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			21.350.628		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			0			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			0		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			705			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			705		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025						RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BAPPEDA 2025					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 dokumen	5.250.000			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 dokumen	5.250.000		
Rincian :						Rincian :					
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			11.200	Digunakan untuk belanja langganan surat kabar		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			11.200	Digunakan untuk belanja langganan surat kabar	
Belanja langganan jurnal / surat kabar / majalah			5.238.800			Belanja langganan jurnal / surat kabar / majalah			5.238.800		
Pembulatan						Pembulatan					
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	3 paket	145.000.000			Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	3 paket	145.000.000		
Rincian :						Rincian :					
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			40.074.400	Digunakan untuk belanja kebutuhan ATK Bappeda (termasuk kebutuhan ATK rutin pada bidang)		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			40.074.400	Digunakan untuk belanja kebutuhan ATK Bappeda (termasuk kebutuhan ATK rutin pada bidang)	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			30.053.500			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			30.053.500		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			11.952.000			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			11.952.000		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			50.321.000			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			50.321.000		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			5.339.100			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			5.339.100		
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			7.260.000			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			7.260.000		
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			0			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			0		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	9.668.393			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	9.668.393		
Rincian :						Rincian :					
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			393	Digunakan untuk belanja makanan dan minuman tamu		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			393	Digunakan untuk belanja makanan dan minuman tamu	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025						RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BAPPEDA 2025					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Natura dan Pakan Natura			7.049.000	sebagaimana pada rincian belanja		Belanja Natura dan Pakan Natura			7.049.000	sebagaimana pada rincian belanja	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			0			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			0		
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			2.619.000			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			2.619.000		
Pembulatan						Pembulatan					
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	87.500.000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	87.500.000		
Rincian :						Rincian :					
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			600	Belanja SPPD Pimpinan untuk TAPD Rp.57.500.000		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			600	Belanja SPPD Pimpinan untuk TAPD Rp.57.500.000	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			72.499.400			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			72.499.400		
Belanja perjalanan dinas dalam kota			15.000.000			Belanja perjalanan dinas dalam kota			15.000.000		
Pembulatan						Pembulatan					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	100%	201.500.000			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	100%	201.500.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	24.000.000			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	24.000.000		
Rincian :						Rincian :					
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			11.400	Digunakan untuk pembayaran tagihan Faksimili/ Internet/TV Berlangganan dan telepon sebagaimana pada rincian belanja		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			11.400	Digunakan untuk pembayaran tagihan Faksimili/ Internet/TV Berlangganan dan telepon sebagaimana pada rincian belanja	
Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan			19.003.200			Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan			19.003.200		
Belanja tagihan telepon			4.985.400			Belanja tagihan telepon			4.985.400		
Pembulatan						Pembulatan					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	177.500.000			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	177.500.000		
Rincian :						Rincian :					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025						RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BAPPEDA 2025					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			6.800	Digunakan untuk pembayaran honor THL yang sudah terdata dalam database PEMKAB sebanyak 7 orang		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			6.800	Digunakan untuk pembayaran honor THL yang sudah terdata dalam database PEMKAB sebanyak 7 orang	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			403.200			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			403.200		
Belanja Jasa Tenaga Administrasi			154.770.000			Belanja Jasa Tenaga Administrasi			154.770.000		
Belanja Jasa Tenaga Supir			13.500.000			Belanja Jasa Tenaga Supir			13.500.000		
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			8.820.000			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			8.820.000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	417.974.400			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	417.974.400		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayatkan pajaknya	40 Kendaraan	115.044.892			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayatkan pajaknya	40 Kendaraan	115.044.892		
Rincian :						Rincian :					
Belanja bahan bakar dan pelumas			55.842.775	Digunakan untuk belanja BBM mobil dinas, pembayaran pajak kendaraan dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana pada rincian belanja		Belanja bahan bakar dan pelumas			55.842.775	Digunakan untuk belanja BBM mobil dinas, pembayaran pajak kendaraan dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana pada rincian belanja	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			3.137			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			3.137		
Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan			14.907.700			Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan			14.907.700		
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraann bermotor Penumpang			37.625.280			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraann bermotor Penumpang			37.625.280		
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua			4.672.000			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua			4.672.000		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			1.994.000			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			1.994.000		
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	277.999.508			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	277.999.508		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025						RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BAPPEDA 2025					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rincian :						Rincian :					
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				- Belanja bahan2 perabot kantor dan bahan kimia Rp.12.234.450 - Renovasi Gedung Bappeda (Cat+Wallpaper+renov ruang rapat) Rp. 196.000.000		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				- Belanja bahan2 perabot kantor dan bahan kimia Rp.12.234.450 - Renovasi Gedung Bappeda (Cat+Wallpaper+renov ruang rapat) Rp. 196.000.000	
Belanja Bahan - Bahan Kimia			805.200			Belanja Bahan - Bahan Kimia			805.200		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			6.813			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			6.813		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			25.856.935			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			25.856.935		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			7.018.560			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			7.018.560		
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			244.312.000			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			244.312.000		
Pembulatan						Pembulatan					
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	6 unit	24.930.000			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	6 unit	24.930.000		
Rincian :						Rincian :					
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			2.400	Digunakan untuk biaya servis AC, servis personal komputer, servis tab, dan servis printer sebagaimana pada rincian belanja		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			2.400	Digunakan untuk biaya servis AC, servis personal komputer, servis tab, dan servis printer sebagaimana pada rincian belanja	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			16.927.500			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			16.927.500		
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer			3.832.500			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer			3.832.500		
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer			4.167.600			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer			4.167.600		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVLUASI PEMBANGUNAN DAERAH	IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan IK 2 : Persentase Data Perencanaan	IK 1 : 90% IK 2 : 80% IK 3 : 85%	1.207.519.708			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVLUASI	IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan IK 2 : Persentase Data Perencanaan	IK 1 : 90% IK 2 : 80% IK 3 : 85%	1.207.519.708		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025						RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BAPPEDA 2025					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan sesuai ketentuan SDI IK 3 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah					PEMBANGUNAN DAERAH	Pembangunan sesuai ketentuan SDI IK 3 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah				
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antar dokumen perencanaan daerah serta dengan dokren instansi vertikal	90%	1.059.269.908			PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antar dokumen perencanaan daerah serta dengan dokren instansi vertikal	90%	1.059.269.908		
Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	444.172.308			Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	444.172.308		
Rincian :						Rincian :					
Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas			0	Untuk pelaksanaan musrenbang RKPD dan RPJMD		Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas			0	Untuk pelaksanaan musrenbang RKPD dan RPJMD	
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor			21.770.308			Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor			21.770.308		
belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak			88.262.000			belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak			88.262.000		
belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan dinas			87.290.000			belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan dinas			87.290.000		
belanja makanan dan minuman rapat			68.200.000			belanja makanan dan minuman rapat			68.200.000		
belanja makanan dan minuman jamuan tamu			20.650.000			belanja makanan dan minuman jamuan tamu			20.650.000		
honorarium narsum atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia			40.200.000			honorarium narsum atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia			40.200.000		
honorarium rohaniwan			600.000			honorarium rohaniwan			600.000		
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			100.000.000			Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			100.000.000		
belanja perjalanan dinas biasa			0			belanja perjalanan dinas biasa			0		
belanja perjalanan dinas dalam kota			17.200.000			belanja perjalanan dinas dalam kota			17.200.000		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025						RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BAPPEDA 2025					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 dokumen	615.097.600			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 dokumen	615.097.600		
Rincian :						Rincian :					
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			3.780.000	Untuk Penyusunan Dokumen RPJMD, RKPD 2026, dan P-RKPD 2025		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			3.780.000	Untuk Penyusunan Dokumen RPJMD, RKPD 2026, dan P-RKPD 2025	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			0			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			0		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			104.075.000			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			104.075.000		
Belanja Natura dan Pakan-Natura			0			Belanja Natura dan Pakan-Natura			0		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			35.850.000			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			35.850.000		
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			0			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			0		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			190.800.000			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			190.800.000		
Honorarium Rohaniwan			600.000			Honorarium Rohaniwan			600.000		
Belanja Jasa Tenaga Administrasi			44.220.000			Belanja Jasa Tenaga Administrasi			44.220.000		
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			100.000.000			Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			100.000.000		
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			19.320.000			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			19.320.000		
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			0			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			0		
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			79.641.600			Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			79.641.600		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			29.711.000			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			29.711.000		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			7.100.000			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			7.100.000		
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	Persentase data perencanaan	80%	70.525.000			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan	Persentase data perencanaan	80%	70.525.000		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025						RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BAPPEDA 2025					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Perencanaan Pembangunan Daerah	pembangunan yang telah memenuhi standar data, metadata, dan daftar data					Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	pembangunan yang telah memenuhi standar data, metadata, dan daftar data				
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dokumen	70.525.000			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dokumen	70.525.000		
Rincian :						Rincian :					
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			24.273.090	Digunakan untuk kegiatan Analisis Data dan Informasi dalam rangka pemenuhan data perencanaan pembangunan		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			24.273.090	Digunakan untuk kegiatan Analisis Data dan Informasi dalam rangka pemenuhan data perencanaan pembangunan	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas			913.500			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas			913.500		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			34.965.000			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			34.965.000		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			3.200.000			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			3.200.000		
Belanja Sewa Peralatan Umum			2.698.410			Belanja Sewa Peralatan Umum			2.698.410		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			2.975.000			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			2.975.000		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1.500.000			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1.500.000		
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	IK 1 : Persentase Capaian Kinerja PD IK 2 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan	IK 1 : 85% IK 2 : 100%	77.724.800			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	IK 1 : Persentase Capaian Kinerja PD IK 2 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan	IK 1 : 85% IK 2 : 100%	77.724.800		
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 laporan	27.501.300			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 laporan	27.501.300		
Rincian :						Rincian :					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025						RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BAPPEDA 2025					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			3.100	Fasilitasi DAK, Penyusunan Laporan DAK, Konsultasi ke kementrian terkait DAK Tematik		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			3.100	Fasilitasi DAK, Penyusunan Laporan DAK, Konsultasi ke kementrian terkait DAK Tematik	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			6.900.000			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			6.900.000		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			8.100.000			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			8.100.000		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12.498.450			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12.498.450		
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 laporan	50.223.500			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 laporan	50.223.500		
Rincian :						Rincian :					
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			800	Evaluasi terhadap Hasil RKPD dan Evaluasi terhadap penyusunan RKPD		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			800	Evaluasi terhadap Hasil RKPD dan Evaluasi terhadap penyusunan RKPD	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1.248.900			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1.248.900		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			28.750.000			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			28.750.000		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			10.450.000			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			10.450.000		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			9.775.150			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			9.775.150		
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik IK 2 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik	IK 1 : 90% IK 2 : 85%	2.786.522.738			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik IK 2 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik	IK 1 : 90% IK 2 : 85%	2.786.522.738		
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas	IK 1 : 90% IK 2 : 85% IK 3 : 100%	784.520.438			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas	IK 1 : 90% IK 2 : 85% IK 3 : 100%	784.520.438		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025						RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BAPPEDA 2025					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik PPM dengan dokren pemda IK 2 : Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik PPM IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik PPM						dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik PPM dengan dokren pemda IK 2 : Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik PPM IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik PPM				
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Laporan	8.846.700			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Laporan	8.846.700		
Rincian :						Rincian :					
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			0	Asitensi penyusunan dokumen perencanaan Renja dan P renja OPD		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			0	Asitensi penyusunan dokumen perencanaan Renja dan P renja OPD	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			8.846.700			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			8.846.700		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	300.370.200			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	300.370.200		
Rincian :						Rincian :					
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			2.200	Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan sinkronisasi perencanaan bidang pemerintahan, Belanja Jasa Konsultansi untuk Survei 100hari Kinerja Kepala Daerah		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			2.200	Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan sinkronisasi perencanaan bidang pemerintahan, Belanja Jasa Konsultansi untuk Survei 100hari Kinerja Kepala Daerah	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			14.110.000			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			14.110.000		
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Penyusunan Dokumen Evaluasi SDG's			0			Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Penyusunan Dokumen Evaluasi SDG's			0		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025						RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BAPPEDA 2025					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Penyusunan Dokumen IKS (Indeks Kesalehan Sosial)			86.415.100			Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Penyusunan Dokumen IKS (Indeks Kesalehan Sosial)			86.415.100		
Survei 100 Hari Kinerja Kepala Daerah			99.997.800			Survei 100 Hari Kinerja Kepala Daerah			99.997.800		
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Penyusunan Dokumen IKUB (Indeks Kerukunan Umat Beragama)			86.415.100			Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Penyusunan Dokumen IKUB (Indeks Kerukunan Umat Beragama)			86.415.100		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			11.430.000			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			11.430.000		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.000.000			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.000.000		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	475.303.538			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	475.303.538		
Rincian :						Rincian :					
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			8.105.250	Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan sinkronisasi perencanaan bidang pembangunan manusia, Penyusunan RPKD		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			8.105.250	Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan sinkronisasi perencanaan bidang pembangunan manusia, Penyusunan RPKD	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1.134.791			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1.134.791		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas			58.364.775			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas			58.364.775		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			80.753.500			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			80.753.500		
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			6.150.000			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			6.150.000		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			87.300.000			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			87.300.000		
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan			0			Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan			0		
Belanja Jasa Tenaga Administrasi			22.110.000			Belanja Jasa Tenaga Administrasi			22.110.000		
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			0			Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			0		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025						RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BAPPEDA 2025					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			19.320.000			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			19.320.000		
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			0			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			0		
Belanja Sewa Peralatan Umum			1.550.800			Belanja Sewa Peralatan Umum			1.550.800		
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik			131.535.222			Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik			131.535.222		
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus			0			Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus			0		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			42.179.200			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			42.179.200		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			16.800.000			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			16.800.000		
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik PSDA dengan dokren pemda IK 2 : Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik PSDA IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan bidang/Tematik PSDA	IK 1 : 90% IK 2 : 85% IK 3 : 100%	782.681.250			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik PSDA dengan dokren pemda IK 2 : Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik PSDA IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan bidang/Tematik PSDA	IK 1 : 90% IK 2 : 85% IK 3 : 100%	782.681.250		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	3.700.000			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	3.700.000		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025						RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BAPPEDA 2025					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rincian :						Rincian :					
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1.200.000	Rapat Koordinasi penyusunan RKPD 2025 dan P-RKPD 2024		Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1.200.000	Rapat Koordinasi penyusunan RKPD 2025 dan P-RKPD 2024	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia			800.000			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia			800.000		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1.700.000			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1.700.000		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	136.319.850			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	136.319.850		
Rincian :						Rincian :					
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas			3.381.850	Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi bidang perekonomian, peresmian proyek hari jadi 2025, Menggeser Honorarium Narsum ke Subkeg Sinergitas Perekonomian		Belanja Bahan Bakar dan Pelumas			3.381.850	Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi bidang perekonomian, peresmian proyek hari jadi 2025, Menggeser Honorarium Narsum ke Subkeg Sinergitas Perekonomian	
Belanja Alat Tulis Kantor (Pembulatan)			100			Belanja Alat Tulis Kantor (Pembulatan)			100		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			4.500.000			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			4.500.000		
Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			0			Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			0		
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			0			Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			0		
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			6.440.000			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			6.440.000		
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik			48.500.000			Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik			48.500.000		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			8.034.900			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			8.034.900		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			6.600.000			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			6.600.000		
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			58.863.000			Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			58.863.000		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025						RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BAPPEDA 2025					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	294.724.000			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	294.724.000		
Rincian :						Rincian :					
Belanja Alat Tulis Kantor (Pembulatan)			77.700	Penyusunan Dokumen Kajian tentang Analisa Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Kajian UMKM		Belanja Alat Tulis Kantor (Pembulatan)			77.700	Penyusunan Dokumen Kajian tentang Analisa Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Kajian UMKM	
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik			287.600.300			Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik			287.600.300		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			4.446.000			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			4.446.000		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.600.000			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.600.000		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	14.518.400			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	14.518.400		
Rincian :						Rincian :					
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas			3.534.300	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan RKPD dan P-RKPD (bidang SDA), TPA Regional serta GRK		Belanja Bahan Bakar dan Pelumas			3.534.300	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan RKPD dan P-RKPD (bidang SDA), TPA Regional serta GRK	
Belanja Alat Tulis Kantor (Pembulatan)			0			Belanja Alat Tulis Kantor (Pembulatan)			0		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1.800.000			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1.800.000		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			8.684.100			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			8.684.100		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			500.000			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			500.000		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	333.419.000			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	333.419.000		
Rincian :						Rincian :					
Belanja bahan bahan bakar dan pelumas			4,025,700	Penyusunan Dokumen Kajian tentang NTP,		Belanja bahan bahan bakar dan pelumas			4,025,700	Penyusunan Dokumen Kajian tentang NTP,	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025						RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BAPPEDA 2025					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ATK Pembulatan			500	dan Evaluasi Pelaporan RAD-GRK, Penyusunan Masterplan RAD Pangan dan Gizi		ATK Pembulatan			500	dan Evaluasi Pelaporan RAD-GRK, Penyusunan Masterplan RAD Pangan dan Gizi	
Belanja Makan Minum Rapat			2.500.000			Belanja Makan Minum Rapat			2.500.000		
Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			1.700.000			Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			1.700.000		
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi			294.800.000			Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi			294.800.000		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			31.518.500			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			31.518.500		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.900.000			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.900.000		
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik Infrastruktur dan Kewilayahan dengan dokren pemda IK 2 : Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik Infrastruktur Dan Kewilayahan IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik Infrastruktur Dan Kewilayahan	IK 1 : 90% IK 2 : 85% IK 3 : 100%	1.219.321.050			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik Infrastruktur dan Kewilayahan dengan dokren pemda IK 2 : Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik Infrastruktur Dan Kewilayahan IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik Infrastruktur Dan Kewilayahan	IK 1 : 90% IK 2 : 85% IK 3 : 100%	1.219.321.050		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir	2 dokumen	15.922.500			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir	2 dokumen	15.922.500		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025						RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BAPPEDA 2025					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
Rincian :						Rincian :					
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			1.795.500	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan RKPD dan P-RKPD (Bidang Infrastruktur), Rapat Sinkronisasi Bidang Infrastruktur dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia agar terwujud sinergi antar dokumen perencanaan pada OPD Bidang Infrastruktur dan Fasilitasi Pokja PKP		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			1.795.500	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan RKPD dan P-RKPD (Bidang Infrastruktur), Rapat Sinkronisasi Bidang Infrastruktur dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia agar terwujud sinergi antar dokumen perencanaan pada OPD Bidang Infrastruktur dan Fasilitasi Pokja PKP	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			0			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			0		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			7.000.000			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			7.000.000		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			6.827.000			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			6.827.000		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			300.000			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			300.000		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	7 Laporan	753.398.550			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	7 Laporan	753.398.550		
Rincian :						Rincian :					
Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas			5,953,500	Penyusunan Dokumen RC Usulan DAK PPKT Tahun 2026 dan Usulan Program Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Kewenangan Provinsi Jawa Timur serta Penyusunan Evaluasi Capaian Akses Sanitasi Tahun 2025 dan Penyusunan Dokumen RAK LLAJ, Honor Tim Pendamping TFL		Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas			5,953,500	Penyusunan Dokumen RC Usulan DAK PPKT Tahun 2026 dan Usulan Program Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Kewenangan Provinsi Jawa Timur serta Penyusunan Evaluasi Capaian Akses Sanitasi Tahun 2025 dan Penyusunan Dokumen RAK LLAJ, Honor Tim Pendamping TFL	
Belanja Alat Tulis Kantor			200			Belanja Alat Tulis Kantor			200		
Honorarium Narasumber			40.600.000			Honorarium Narasumber			40.600.000		
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan			126.000.000			Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan			126.000.000		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			30.115.000			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			30.115.000		
Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi						Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi					
Kajian Dampak Ekonomi atas Penanganan Infrastruktur Permukiman Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Kewenangan Provinsi Jawa Timur			0			Kajian Dampak Ekonomi atas Penanganan Infrastruktur Permukiman Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Kewenangan Provinsi Jawa Timur			0		
Kajian Dampak Ekonomi atas Penanganan Infrastruktur Permukiman Kumuh Terpadu dan			71.200.500			Kajian Dampak Ekonomi atas Penanganan Infrastruktur Permukiman			71.200.500		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025						RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BAPPEDA 2025					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terintegrasi Skala Kawasan Desa Kepuhanyar						Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Skala Kawasan Desa Kepuhanyar					
Penyusunan Dokumen Kajian HIA (Heritage Impact Assessment) atas Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Kewenangan Provinsi Jawa Timur			0			Penyusunan Dokumen Kajian HIA (Heritage Impact Assessment) atas Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Kewenangan Provinsi Jawa Timur			0		
Penyusunan Dokumen Masterplan Penanganan Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Kewenangan Provinsi Jawa Timur			53.100.300			Penyusunan Dokumen Masterplan Penanganan Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Kewenangan Provinsi Jawa Timur			53.100.300		
Penyusunan Dokumen Masterplan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu			60.900.200			Penyusunan Dokumen Masterplan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu			60.900.200		
Penyusunan Dokumen Perencanaan SID (Survey Investigation Design) Penanganan Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Kewenangan Provinsi Jawa Timur			51.800.400			Penyusunan Dokumen Perencanaan SID (Survey Investigation Design) Penanganan Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Kewenangan Provinsi Jawa Timur			51.800.400		
Penyusunan Dokumen Perencanaan SID (Survey Investigation Design) Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu			70.100.400			Penyusunan Dokumen Perencanaan SID (Survey Investigation Design) Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu			70.100.400		
Penyusunan Dokumen RAK LLAJ Kabupaten Mojokerto			150.000.100			Penyusunan Dokumen RAK LLAJ Kabupaten Mojokerto			150.000.100		
Penyusunan Dokumen RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah) Kabupaten Mojokerto			0			Penyusunan Dokumen RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah) Kabupaten Mojokerto			0		
Penyusunan Dokumen Evaluasi Implementasi SSK Kabupaten Mojokerto Milestone 4 Lanjutan			51.400.200			Penyusunan Dokumen Evaluasi Implementasi SSK Kabupaten Mojokerto Milestone 4 Lanjutan			51.400.200		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025						RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BAPPEDA 2025					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			45.481.250			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			45.481.250		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.700.000			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.700.000		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 laporan	450.000.000			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 laporan	450.000.000		
Rincian :						Rincian :					
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			5.730.000	Fasilitasi Penyusunan Revisi RTRW, FS Calon Ibukota Baru, BOP FS Ibukota baru, Honor Tim Ahli RTRW		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			5.730.000	Fasilitasi Penyusunan Revisi RTRW, FS Calon Ibukota Baru, BOP FS Ibukota baru, Honor Tim Ahli RTRW	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			900			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			900		
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			1,455,300			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			1,455,300		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			3.960.000			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			3.960.000		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			154.700.000			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			154.700.000		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			34.808.600			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			34.808.600		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1.300.000			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1.300.000		
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik			249.500.500			Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik			249.500.500		
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	IK 1 : Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah IK 2 : Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Riset dan Inovasi Daerah	IK 1 : 80% IK 2 : 85%	599.675.850			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	IK 1 : Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah IK 2 : Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Riset dan Inovasi Daerah	IK 1 : 80% IK 2 : 85%	599.675.850		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Jumlah Laporan/Dokumen Verifikasi Daftar	1 Laporan	105.000.000			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Jumlah Laporan/Dokumen Verifikasi Daftar	1 Laporan	105.000.000		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025						RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BAPPEDA 2025					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Agenda Riset di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Agenda Riset di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	105.000.000			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	105.000.000		
Rincian :						Rincian :					
Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Biaya Konsumsi (Makan) 50 Kotak x @44.000 = 2.200.000) (Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 50 Kotak x @23.000 = 1.150.000)			3.350.000	Belanja Jasa Konsultansi untuk Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai InMenDagri Nomor 2 Tahun 2025		Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Biaya Konsumsi (Makan) 50 Kotak x @44.000 = 2.200.000) (Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 50 Kotak x @23.000 = 1.150.000)			3.350.000	Belanja Jasa Konsultansi untuk Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai InMenDagri Nomor 2 Tahun 2025	
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Photo copy 230 lembar x @400 = 92.000) (Flash disk 1 buah x @105.800 = 105.800) (Gaji Tenaga Ahli D3 2org x 2bln x @6.000.000 = 24.000.000) (Gaji Tenaga Ahli S2-S3 Ahli Muda 1org x 2bln x @10.400.000 = 20.800.000) (Gaji Tenaga Ahli S2-S3 Ahli Madya 1org x 2bln x @13.000.000 = 26.000.000) (Gaji Tenaga Surveyor SMA-D3 13org x 1bln x @2.000.000 = 26.000.000) (Laporan Pendahuluan 5 eks x @300.000 = 1.500.000) (Laporan Final 5 eks x @300.000 = 1.500.000)			99.997.800			Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Photo copy 230 lembar x @400 = 92.000) (Flash disk 1 buah x @105.800 = 105.800) (Gaji Tenaga Ahli D3 2org x 2bln x @6.000.000 = 24.000.000) (Gaji Tenaga Ahli S2-S3 Ahli Muda 1org x 2bln x @10.400.000 = 20.800.000) (Gaji Tenaga Ahli S2-S3 Ahli Madya 1org x 2bln x @13.000.000 = 26.000.000) (Gaji Tenaga Surveyor SMA-D3 13org x 1bln x @2.000.000 = 26.000.000) (Laporan Pendahuluan 5 eks x @300.000 = 1.500.000) (Laporan Final 5 eks x @300.000 = 1.500.000)			99.997.800		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025						RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BAPPEDA 2025					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						(Laporan Final 5 eks x @300.000 = 1.500.000)					
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Tarif E-Tol 24 Km x @1.100 = 26.400) (Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud... 3 Orang/Hari x @375.000 = 1.125.000)			1.151.400			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Tarif E-Tol 24 Km x @1.100 = 26.400) (Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud... 3 Orang/Hari x @375.000 = 1.125.000)			1.151.400		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Uang harian 5 x @100.000 = 500.000)			500.000			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Uang harian 5 x @100.000 = 500.000)			500.000		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (800 lembar x @1,00 = 800)			800			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (800 lembar x @1,00 = 800)			800		
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil-Hasil Riset dan Inovasi yang difasilitasi	85,00%	494.675.850			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil-Hasil Riset dan Inovasi yang difasilitasi	85,00%	494.675.850		
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	178.892.800			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	178.892.800		
Rincian :						Rincian :					
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			0	Fasilitasi Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Informasi dan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ-PID) Periode 2025-2030		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			0	Fasilitasi Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Informasi dan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ-PID) Periode 2025-2030	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			15.610.000			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			15.610.000		
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			0			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			0		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12.091.700			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12.091.700		
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik			151.191.100			Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik			151.191.100		
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan	2 Laporan	315.783.050			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan	2 Laporan	315.783.050		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025						RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BAPPEDA 2025					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran P-RKPD 2025	Rincian Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan						Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				
Rincian :						Rincian :					
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			0	Fasilitasi Lomba Inovasi dan Pengukuran Indeks, Honorarium Tim Percepatan Pembangunan Daerah		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			0	Fasilitasi Lomba Inovasi dan Pengukuran Indeks, Honorarium Tim Percepatan Pembangunan Daerah	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1.239.850			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1.239.850		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			1.905.800			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			1.905.800		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			37.560.000			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			37.560.000		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			197.050.000			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			197.050.000		
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan			7.500.000			Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan			7.500.000		
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan			0			Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan			0		
Belanja Sewa Peralatan Umum			0			Belanja Sewa Peralatan Umum			0		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.957.400			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.957.400		
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan			33.250.000			Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan			33.250.000		
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			16.920.000			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			16.920.000		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			4.400.000			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			4.400.000		
JUMLAH TOTAL PAGU			12.668.615.100			JUMLAH TOTAL PAGU			12.668.615.100		

Berdasarkan penyandingan antara dokumen RKPD Perubahan Tahun 2025 dan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa konsistensi substansi perencanaan telah dijaga dengan baik. Hal ini terlihat dari keselarasan nomenklatur program dan kegiatan, kesamaan indikator kinerja, target, hingga nilai anggaran yang tercantum di kedua dokumen secara identik. Artinya, tidak terdapat deviasi antara dokumen makro dan dokumen operasional teknis Bappeda, yang mencerminkan kuatnya proses integrasi perencanaan lintas level.

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa pada tahun awal periode RPJMD 2025-2029, Bappeda telah berhasil memosisikan diri sebagai institusi penjaga konsistensi dokumen perencanaan, baik secara vertikal (dengan RPJMD dan RKPD) maupun horizontal (dengan OPD lainnya). Konsistensi ini menjadi fondasi penting untuk menjamin bahwa pelaksanaan program pada tahun pertama RPJMD berjalan sesuai kerangka logis pembangunan lima tahunan.

Dengan demikian, keselarasan antara RKPD Perubahan dan Renja Perubahan Bappeda Tahun 2025 merupakan refleksi awal dari implementasi prinsip akuntabilitas perencanaan dan efektivitas konsolidasi dokumen strategis. Hal ini menjadi modal kelembagaan yang sangat strategis bagi Bappeda dalam mengawal pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah melalui pendekatan perencanaan yang sistematis, tepat sasaran, dan responsif terhadap dinamika daerah.

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk Perubahan Renja tahun 2025, usulan program dan kegiatan masyarakat di Bappeda Kabupaten Mojokerto tidak ada. Adapun Bappeda Kabupaten Mojokerto bertugas sebagai verifikator usulan program dan kegiatan masyarakat pada OPD yang bersangkutan.

Tabel 2.3 (Tabel T-C.32 pada pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Perubahan Renja Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	13

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memasuki tahun awal dari pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Mojokerto 2025-2029, perencanaan kerja dan penganggaran tahunan menjadi titik krusial yang menentukan efektivitas pelembagaan arah pembangunan jangka menengah ke dalam kebijakan operasional dan langkah-langkah konkret di lapangan. Bab ini memuat rancangan kegiatan, indikator kinerja, dan alokasi pendanaan yang tidak hanya mencerminkan pelaksanaan teknis tugas Bappeda, tetapi sekaligus menjadi gambaran sejauh mana fondasi arah strategis lima tahunan mulai ditransformasikan dalam tata kelola tahunan yang fungsional dan berdampak.

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Renstra Bappeda 2025-2029, Tahun 2025 sebagai fase pembuka menjadi landasan penting untuk membangun sistem kerja yang efektif, memperkuat sinergi internal dan eksternal, serta memastikan seluruh perangkat pelaksana program bekerja dalam kerangka sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, rencana kerja dan pendanaan pada tahun ini perlu diarahkan tidak semata untuk mencapai target fisik atau penyerapan anggaran, tetapi lebih dari itu yaitu menjadi instrumen awal untuk menjamin konsistensi logika perencanaan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta keberfungsian Bappeda sebagai institusi perencana, pengendali, dan inovator pembangunan daerah.

Dalam kerangka tersebut, penyusunan rencana kerja dan pendanaan Bappeda Tahun 2025 berfokus pada pencapaian dua sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD); dan
2. Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah dengan indikator Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi.

Seluruh program dan kegiatan disusun untuk menjawab mandat strategis tersebut, dengan penguatan pada aspek integrasi perencanaan antar OPD, pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar penyusunan kebijakan, serta fasilitasi terhadap lahirnya inovasi kebijakan berbasis riset dan data.

Sebagai alat kendali dan perumusan agenda kerja organisasi, bab ini tidak hanya menyajikan rincian administratif program dan kegiatan, namun sekaligus memetakan hubungan antara arah strategis lembaga dengan pelaksanaan teknis yang dapat diukur, dimonitor, dan dievaluasi. Perubahan rencana kerja dan pendanaan pada tahun 2025 diharapkan dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pembangunan lima tahunan berjalan secara logis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara kinerja.

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Setelah menguraikan konteks strategis dan pijakan arah kelembagaan pada tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025-2029, bagian ini secara khusus menguraikan susunan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, serta pagu anggaran BAPPEDA Kabupaten Mojokerto yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2025 berdasarkan hasil perubahan dan penyesuaian terbaru.

Rencana kerja dan pendanaan ini tidak hanya mencerminkan pemenuhan mandat teknis sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, tetapi juga berfungsi sebagai wahana konsolidasi aktualisasi peran kelembagaan Bappeda dalam menjalankan fungsi utamanya, yaitu menyelaraskan dokumen perencanaan lintas dokumen, memperkuat keterhubungan antarkebijakan, serta menjembatani antara kebutuhan strategis daerah dan pelaksanaan program prioritas pembangunan.

Setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam subbab ini telah dirancang berdasarkan struktur tujuan dan sasaran Renstra, diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, serta diperkuat melalui penajaman hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada triwulan pertama. Penyusunan pendanaan juga mempertimbangkan kesinambungan pelaksanaan tahapan konsolidasi kelembagaan (2025-2026) sebagaimana telah ditetapkan dalam kerangka pentahapan Renstra.

Dalam konteks tersebut, pemilihan kegiatan dan alokasi pagu anggaran tidak semata dilakukan berdasarkan pertimbangan kelaziman atau rutinitas, tetapi telah melalui pendekatan berbasis capaian (*outcome-based*), disertai dengan logika intervensi yang konsisten antara input, output, dan hasil yang diharapkan. Kejelasan keterkaitan antara anggaran, indikator kinerja, dan sasaran strategis menjadi fondasi penting dalam menjamin akuntabilitas pelaksanaan program dan penguatan kontribusi Bappeda terhadap keberhasilan agenda pembangunan daerah.

Melalui rumusan rencana kerja dan pendanaan ini diharapkan tidak hanya menjadi instrumen perencanaan teknis tahunan, tetapi juga sebagai refleksi awal dari bagaimana prinsip-prinsip strategis pembangunan lima tahunan mulai diwujudkan secara konkret melalui desain kerja dan pendanaan yang sistematis, terukur, dan selaras dengan dinamika kebutuhan daerah.

Adapun Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1. berikut ini:

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan P-RENJA 2025 BAPPEDA

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/Kurang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,00 (A)	7.228.710.500		236.470.031	6.992.237.872		8.074.896.804		1.082.658.932	
	Persentase Realisasi Anggaran	90,50%									
	IP ASN	85,90									
	Jumlah inovasi yang memenuhi 20 Indikator Indeks Inovasi Daerah Kemendagri	2 Inovasi									
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Bappeda	100%	15.000.000		7.502.310	7.497.690		12.000.000		4.502.310	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	7.500.000		3.751.155	3.748.845	3 dokumen	7.500.000		3.751.155	
Rincian :											
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			2.310	Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen perencanaan PD meliputi dokumen RENSTRA, RENJA 2026, dan P-RENJA 2025	2.310	0		525	Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen perencanaan PD meliputi dokumen RENSTRA, RENJA 2026, dan P-RENJA 2025		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.208.790		604.395	604.395		3.021.975			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			4.188.900		2.094.450	2.094.450		1.977.500			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.100.000		1.050.000	1.050.000		2.500.000			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 laporan	7.500.000		3.751.155	3.748.845	9 laporan	4.500.000		751.155	
Rincian :											
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			2.310	Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja PD meliputi dokumen	2.310	0		3.000	Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja PD meliputi dokumen		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.208.790		604.395	604.395		0			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			4.188.900		2.094.450	2.094.450		4.497.000			

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/Kurang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.100.000	dokumen Evaluasi Kinerja PD meliputi dokumen LKjIP, LPPD, LKPJ, SAKIP, Evaluasi Kinerja 3 bulanan, RMRB, SKM, dan Evaluasi Renstra 2021-2026	1.050.000	1.050.000		0	LKjIP, LPPD, LKPJ, SAKIP, Evaluasi Kinerja 3 bulanan, RMRB, SKM, dan Evaluasi Renstra 2021-2026		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran yang tercapai	90,50 %	6.303.647.000		-	6.303.647.000		6.303.647.000		0	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/bulan	6.303.647.000		-	6.303.647.000		6.303.647.000		0	
Rincian :											
Belanja gaji pokok PNS			1.981.847.000	Digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN		1.981.847.000		1.981.847.000			
Belanja Gaji Pokok PPPK			32.036.000			32.036.000		32.036.000			
Belanja Tunjangan Keluarga PNS			195.880.000			195.880.000		195.880.000			
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			4.486.000			4.486.000		4.486.000			
Belanja Tunjangan Jabatan PNS			112.768.000			112.768.000		112.768.000			
Belanja Tunjangan Fungsional PNS			231.173.000			231.173.000		231.173.000			
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			38.499.000			38.499.000		38.499.000			
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			1.850.000			1.850.000		1.850.000			
Belanja Tunjangan Beras PNS			111.238.000			111.238.000		111.238.000			
Belanja Tunjangan Beras PPPK			2.897.000			2.897.000		2.897.000			
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			14.669.000			14.669.000		14.669.000			
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			500.000			500.000		500.000			
Belanja Pembulatan Gaji PNS			228.000			228.000		228.000			
Belanja Pembulatan Gaji PPPK			50.000			50.000		50.000			
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			4.757.000			4.757.000		4.757.000			
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			77.000			77.000		77.000			
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			14.270.000			14.270.000		14.270.000			
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			231.000			231.000		231.000			
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			9.910.000			9.910.000		9.910.000			
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			161.000			161.000		161.000			

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/Kurang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			2.480.320.000			2.480.320.000		2.480.320.000			
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS			972.800.000			972.800.000		972.800.000			
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			93.000.000			93.000.000		93.000.000			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai	100%	490.500.000		196.644.171	293.853.232		1.139.775.404		845.922.172	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	100.000.000		49.716.144	50.283.856	2 paket	813.868.528		763.584.672	
Rincian :											
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			33.955	Digunakan untuk pengadaan Laptop (6 unit), Printer (1 unit), AC Standing (1 unit), Smart TV (1 unit), Camera conf (1 unit), TV Connector (3 set), dan CCTV (3 unit)	0	33.955		28.571.400	- Pengadaan AC Lantai 2 Rp.36.280.572 - Pengadaan Videotron+Audio Rp.727.304.100		
Belanja Modal Peralatan Studio Audio			697.413		0	697.413		35.215.600			
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			2.020.000		0	2.020.000		2.020.000			
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya			13.777.472		13.435.572	341.900		341.900			
Belanja Modal Alat Pendingin			36.280.572		36.280.572	0		36.280.572			
Belanja Modal Personal Computer			39.286.500		0	39.286.500		39.286.500			
Belanja Modal Peralatan Personal Computer			7.904.088		0	7.904.088		14.430.588			
Pembulatan			1.000					4.155			
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film								657.020.400			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			697.413					697.413			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 paket	50.000.000		25.000.000	25.000.000		25.000.000		0	
Rincian :											
Belanja makanan dan minuman rapat			50.000.000	Digunakan untuk belanja makanan dan minuman rapat sebagaimana pada rincian belanja	25.000.000	25.000.000		25.000.000			
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa											
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	60.000.000		31.349.017	28.650.983		53.488.483		24.837.500	
Rincian :											
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			6.060.000	Digunakan untuk		6.060.000		6.060.000	- Belanja Cetak dan Bendera Agustusan		

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/Kurang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			1.360.000	pengadaan banner, stopmap, jasa iklan/reklame, dan fotocopy sebagaimana pada rincian belanja	1.360.000	0		0	Rp. 14.837.500 - Keperluan Media Massa Rp.10.000.000		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			33.006.991		17.533.041	15.473.950		26.077.150			
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			14.233.752		7.116.876	7.116.876		21.350.628			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			5.339.100		5.339.100	0		0			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			157		0	157		705			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 dokumen	10.500.000		5.250.000	5.250.000		5.250.000		0	
Rincian :											
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			22.400	Digunakan untuk belanja langganan surat kabar	11.200	11.200		11.200			
Belanja langganan jurnal / surat kabar / majalah			10.477.600		5.238.800	5.238.800		5.238.800			
Pembulatan											
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	3 paket	195.000.000		50.000.000	145.000.000		145.000.000		0	
Rincian :											
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			55.142.400	Digunakan untuk belanja kebutuhan ATK Bappeda (termasuk kebutuhan ATK rutin pada bidang)	15.068.000	40.074.400		40.074.400			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			31.163.700		1.110.200	30.053.500		30.053.500			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			16.142.400		4.190.400	11.952.000		11.952.000			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			69.752.400		19.431.400	50.321.000		50.321.000			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			5.339.100		0	5.339.100		5.339.100			
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			7.260.000		0	7.260.000		7.260.000			
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			10.200.000		10.200.000	0		0			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	15.000.000		5.329.010	9.668.393		9.668.393		0	
Rincian :											
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			393	Digunakan untuk belanja makanan dan minuman tamu		393		393			
Belanja Natura dan Pakan Natura			9.378.113		2.582.638	6.795.475		7.049.000			
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1.120.000		1.120.000	0		0			

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/Kurang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			4.501.494	sebagaimana pada rincian belanja	1.626.372	2.875.122		2.619.000			
Pembulatan											
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	60.000.000		30.000.000	30.000.000		87.500.000		57.500.000	
Rincian :											
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			700	Digunakan untuk belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota sebagaimana pada rincian belanja	100	600		600	Belanja SPPD Pimpinan untuk TAPD Rp.57.500.000		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			44.999.300		22.499.900	22.499.400		72.499.400			
Belanja perjalanan dinas dalam kota			15.000.000		7.500.000	7.500.000		15.000.000			
Pembulatan											
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	100%	197.500.000		-	197.500.000		201.500.000		4.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	24.000.000		-	24.000.000		24.000.000		0	
Rincian :											
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			11.400	Digunakan untuk pembayaran tagihan Faksimili/ Internet/TV Berlangganan dan telepon sebagaimana pada rincian belanja		11.400		11.400			
Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan			19.003.200			19.003.200		19.003.200			
Belanja tagihan telepon			4.985.400			4.985.400		4.985.400			
Pembulatan											
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	173.500.000		-	173.500.000		177.500.000		4.000.000	
Rincian :											

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/Kurang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			2.800	Digunakan untuk pembayaran honor THL yang sudah terdata dalam database PEMKAB sebanyak 7 orang	0			6.800	Tambahkan Kekurangan Gaji THL 4jt		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			907.200		0			403.200			
Belanja Jasa Tenaga Administrasi			154.770.000		0			154.770.000			
Belanja Jasa Tenaga Supir			9.000.000		0			13.500.000			
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			8.820.000		0			8.820.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	222.063.500		32.323.550	189.739.950		417.974.400		228.234.450	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayatkan pajaknya	40 Kendaraan	115.133.992		20.089.100	95.044.892		115.044.892		20.000.000	
Rincian :											
Belanja bahan bakar dan pelumas			55.842.775	Digunakan untuk belanja BBM mobil dinas, pembayaran pajak kendaraan dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana pada rincian belanja				55.842.775	Service Mobil Bidang PPM dan Litbang 20jt (@10jt)		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			2.417					3.137			
Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan			14.907.700					14.907.700			
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraann bermotor Penumpang			37.296.000		18.648.000	18.648.000		37.625.280			
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua			3.650.000					4.672.000			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			3.435.100		1.441.100	1.994.000		1.994.000			
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	81.999.508		12.234.450	69.765.058	2 unit	277.999.508		208.234.450	
Rincian :											
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				Digunakan untuk rehabilitasi atap lantai 2 terutama ruang rapat dan ruang arsip, pengecatan interior kantor					- Belanja bahan2 perabot kantor dan bahan kimia Rp.12.234.450 - Renovasi Gedung Bappeda (Cat+Wallpaper+renov ruang rapat) Rp. 196.000.000		
Belanja Bahan - Bahan Kimia			805.200		358.200	447.000		805.200			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			6.813			6.813		6.813			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			25.856.935		11.876.250	13.980.685		25.856.935			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			7.018.560			7.018.560		7.018.560			

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/Kurang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			48.312.000	serta belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor sebagaimana pada rincian belanja		48.312.000		244.312.000			
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	6 unit	24.930.000		-	24.930.000		24.930.000		0	
Rincian :											
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			2.400	Digunakan untuk biaya servis AC, servis personal komputer, servis tab, dan servis printer sebagaimana pada rincian belanja	0			2.400			
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			16.927.500		0			16.927.500			
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer			3.832.500		0			3.832.500			
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer			4.167.600		0			4.167.600			
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVLUASI PEMBANGUNAN DAERAH	IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan IK 2 : Persentase Data Perencanaan Pembangunan sesuai ketentuan SDI IK 3 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	IK 1 : 90% IK 2 : 80% IK 3 : 85%	1.339.109.308		131.588.000	1.207.519.708		1.207.519.708		0	
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antar dokumen perencanaan daerah serta dengan dokren instansi vertikal	90%	1.164.109.308		104.839.400	1.059.269.908		1.059.269.908		0	
Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	464.109.308		19.937.000	444.172.308		444.172.308		0	
Rincian :											

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/Kurang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas			567.000	Untuk pelaksanaan musrenbang RKPD dan RPJMD	567.000	0		0			
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor			21.770.308			21.770.308		21.770.308			
belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak			88.262.000			88.262.000		88.262.000			
belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan dinas			87.290.000			87.290.000		87.290.000			
belanja makanan dan minuman rapat			68.200.000			68.200.000		68.200.000			
belanja makanan dan minuman jamuan tamu			20.650.000			20.650.000		20.650.000			
honorarium narsum atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia			40.200.000			40.200.000		40.200.000			
honorarium rohaniwan			600.000			600.000		600.000			
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			100.000.000			100.000.000		100.000.000			
belanja perjalanan dinas biasa			3.970.000		3.970.000	0		0			
belanja perjalanan dinas dalam kota			32.600.000		15.400.000	17.200.000		17.200.000			
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 dokumen	700.000.000		84.902.400	615.097.600		615.097.600		0	
Rincian :											
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			9.109.800	Untuk Penyusunan Dokumen RPJMD, RKPD 2026, dan P-RKPD 2025	5.329.800	3.780.000		3.780.000			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor			1.000		1.000	0		0			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			104.075.000		0	104.075.000		104.075.000			
Belanja Natura dan Pakan-Natura			7.592.400		7.592.400	0		0			
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			39.793.500		3.943.500	35.850.000		35.850.000			
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			4.928.400		4.928.400	0		0			
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			190.800.000		0	190.800.000		190.800.000			
Honorarium Rohaniwan			600.000		0	600.000		600.000			
Belanja Jasa Tenaga Administrasi			44.220.000		0	44.220.000		44.220.000			
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			100.000.000		0	100.000.000		100.000.000			
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			19.320.000		0	19.320.000		19.320.000			
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			25.200.000		25.200.000	0		0			
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			79.641.600		0	79.641.600		79.641.600			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			64.018.300		34.307.300	29.711.000		29.711.000			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			10.700.000		3.600.000	7.100.000		7.100.000			

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/Kurang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data perencanaan pembangunan yang telah memenuhi standar data, metadata, dan daftar data	80%	75.000.000		4.475.000	70.525.000		70.525.000		0	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dokumen	75.000.000		4.475.000	70.525.000		70.525.000		0	
Rincian :											
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			24.273.090	Digunakan untuk kegiatan Analisis Data dan Informasi dalam rangka pemenuhan data perencanaan pembangunan	0	24.273.090		24.273.090			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas			913.500		0	913.500		913.500			
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			34.965.000		0	34.965.000		34.965.000			
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			3.200.000		0	3.200.000		3.200.000			
Belanja Sewa Peralatan Umum			2.698.410		0	2.698.410		2.698.410			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			5.950.000		2.975.000	2.975.000		2.975.000			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.000.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000			
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	IK 1 : Persentase Capaian Kinerja PD IK 2 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan	IK 1 : 85% IK 2 : 100%	100.000.000		22.273.600	77.724.800		77.724.800		0	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 laporan	40.000.000		12.498.450	27.501.300		27.501.300		0	
Rincian :											
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			3.100	Fasilitasi DAK, Penyusunan Laporan DAK, Konsultasi ke kementerian terkait DAK Tematik	0	3.100		3.100			
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			6.900.000		0	6.900.000		6.900.000			
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			8.100.000		0	8.100.000		8.100.000			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			24.996.900		12.498.450	12.498.450		12.498.450			

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/Kurang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 laporan	60.000.000		9.775.150	50.223.500		50.223.500		0	
Rincian :											
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			800	Evaluasi terhadap Hasil RKPD dan Evaluasi terhadap penyusunan RKPD	0	800		800			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.248.900		0	1.248.900		1.248.900			
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			28.750.000		0	28.750.000		28.750.000			
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			10.450.000		0	10.450.000		10.450.000			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			19.550.300		9.775.150	9.775.150		9.775.150			
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik IK 2 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik	IK 1 : 90% IK 2 : 85%	2.698.130.787		606.411.349	2.341.704.138		2.786.522.738		444.818.600	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik PPM dengan dokren pemda IK 2 : Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik PPM IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan bidang/Tematik PPM	IK 1 : 90% IK 2 : 85% IK 3 : 100%	892.000.000		272.479.562	619.520.438		784.520.438		165.000.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir	2 Laporan	24.000.000		15.153.300	8.846.700	2 Laporan	8.846.700		0	

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/Kurang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
Rincian :											
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1.800	Asitensi penyusunan dokumen perencanaan Renja dan P renja OPD	1.800	0		0			
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			23.998.200		15.151.500	8.846.700		8.846.700			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	280.000.000		84.629.800	195.370.200	4 Laporan	300.370.200		105.000.000	
Rincian :											
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			9.700	Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan sinkronisasi perencanaan bidang pemerintahan	9.700	0		2.200	Belanja Jasa Konsultansi untuk Survei 100hari Kinerja Kepala Daerah Rp. 105.000.000		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			10.710.000		0	10.710.000		14.110.000			
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Penyusunan Dokumen Evaluasi SDG's			72.415.100		72.415.100	0		0			
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Penyusunan Dokumen IKS (Indeks Kesalehan Sosial)			86.415.100		0	86.415.100		86.415.100			
Survei 100 Hari Kinerja Kepala Daerah								99.997.800			
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Penyusunan Dokumen IKUB (Indeks Kerukunan Umat Beragama)			86.415.100		0	86.415.100		86.415.100			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			23.235.000		11.805.000	11.430.000		11.430.000			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			800.000		400.000	400.000		2.000.000			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	588.000.000		172.696.462	415.303.538	10 Laporan	475.303.538		60.000.000	
Rincian :											
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			16.130.250	Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan sinkronisasi perencanaan bidang	8.105.250	8.025.000		8.105.250	Penyusunan RPKD 60jt		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.133.952		0	1.133.952		1.134.791			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas			58.364.775		0	58.364.775		58.364.775			
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			78.262.500		0	78.262.500		80.753.500			
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			6.150.000		0	6.150.000		6.150.000			
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			58.400.000		0	58.400.000		87.300.000			

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/Kurang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan			1.000.000	pembangunan manusia	1.000.000	0		0			
Belanja Jasa Tenaga Administrasi			22.110.000		0	22.110.000		22.110.000			
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			30.000.000		0	30.000.000		0			
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			19.320.000		0	19.320.000		19.320.000			
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			2.720.000		2.720.000	0		0			
Belanja Sewa Peralatan Umum			3.101.600		1.550.800	1.550.800		1.550.800			
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik			73.149.111		0	73.149.111		131.535.222			
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus			115.983.012		115.983.012	0		0			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			71.674.800		35.837.400	35.837.400		42.179.200			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			30.500.000		7.500.000	23.000.000		16.800.000			
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik PSDA dengan dokren pemda IK 2 : Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik PSDA IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik PSDA	IK 1 : 90% IK 2 : 85% IK 3 : 100%	742.130.787		109.434.237	632.681.250		782.681.250		150.000.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	10.000.000		6.300.000	3.700.000	2 dokumen	3.700.000		0	
Rincian :											
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			5.000.000	Rapat Koordinasi penyusunan	3.800.000	1.200.000		1.200.000			
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia			1.600.000		800.000	800.000		800.000			

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/Kurang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.400.000	RKPD 2025 dan P-RKPD 2024	1.700.000	1.700.000		1.700.000			
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	147.130.787		59.895.637	87.219.850	4 Laporan	136.319.850		49.100.000	
Rincian :											
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas			6.561.750	Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi bidang perekonomian	3.000.000	3.561.750		3.381.850	- Tambah 50jt untuk peresmian proyek hari jadi 2025 - Menggeser Honorarium Narsum ke Subkeg Sinergitas Perekonomian Rp.900.000		
Belanja Alat Tulis Kantor (Pembulatan)			837		837	0		100			
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			6.590.000		2.000.000	4.590.000		4.500.000			
Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			2.400.000		1.600.000	800.000		0			
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			60.548.600		0	60.548.600		0			
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			6.440.000		0	6.440.000		6.440.000			
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik			42.000.000		42.000.000	0		48.500.000			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			16.989.600		8.494.800	8.494.800		8.034.900			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			5.600.000		2.800.000	2.800.000		6.600.000			
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara								58.863.000			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	300.000.000		6.176.000	293.824.000	3 Laporan	294.724.000		900.000	
Rincian :											
Belanja Alat Tulis Kantor (Pembulatan)			47.700	Penyusunan Dokumen Kajian tentang Analisa Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Kajian UMKM	0	47.700		77.700	Pergeseran Honorarium Narsum dari Subkeg Monev Perekonomian Rp.900.000		
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik			287.600.300		0	287.600.300		287.600.300			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			9.952.000		4.976.000	4.976.000		4.446.000			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.400.000		1.200.000	1.200.000		2.600.000			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir	2 dokumen	25.000.000		10.481.600	14.518.400	2 dokumen	14.518.400		0	

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/Kurang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
Rincian :											
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas			4.725.000	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan RKPD dan P-RKPD (bidang SDA), TPA Regional serta GRK	1.190.700	3.534.300		3.534.300			
Belanja Alat Tulis Kantor (Pembulatan)			500		500	0		0			
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1.800.000		0	1.800.000		1.800.000			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			17.774.500		9.090.400	8.684.100		8.684.100			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			700.000		200.000	500.000		500.000			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	260.000.000		26.581.000	233.419.000	4 Laporan	333.419.000		100.000.000	
Rincian :											
Belanja bahan bahan bakar dan pelumas			5.140.800		1.100.800	4.040.000		4,025,700			
ATK Pembulatan			200		200	0		500			
Belanja Makan Minum Rapat			4.500.000		2.000.000	2.500.000		2.500.000			
Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			4.800.000		3.100.000	1.700.000		1.700.000			
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi			195.200.000		0	195.200.000		294.800.000			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			45.359.000		18.380.000	26.979.000		31.518.500			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			5.000.000		2.000.000	3.000.000		2.900.000			
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik Infrastruktur dan Wilayah dengan dokren pemda IK 2 : Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik Infrastruktur Dan Wilayah IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi	IK 1 : 90% IK 2 : 85% IK 3 : 100%	1.064.000.000		224.497.550	1.089.502.450		1.219.321.050		129.818.600	

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/Kurang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik Infrastruktur Dan Kewilayahan										
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	25.000.000		9.077.500	15.922.500	2 dokumen	15.922.500		0	
Rincian :											
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			3.591.000	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan RKPD dan P-RKPD (Bidang Infrastruktur), Rapat Sinkronisasi Bidang Infrastruktur dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia agar terwujud sinergi antar dokumen perencanaan pada OPD Bidang Infrastruktur dan Fasilitasi Pokja PKP	1.795.500	1.795.500		1.795.500			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			800		800	0		0			
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			7.000.000		0	7.000.000		7.000.000			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			13.808.200		6.981.200	6.827.000		6827000			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			600.000		300.000	300.000		300000			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	7 Laporan	939.000.000		215.420.050	723.579.950	7 Laporan	753.398.550		29.818.600	
Rincian :											
Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas			5.953.500	Penyusunan Dokumen RC	0	5.953.500		5.953.500			
Belanja Alat Tulis Kantor			450		450	0		200			

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/Kurang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Honorarium Narasumber			22.000.000	Usulan DAK PPKT Tahun 2026 dan Usulan Program Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Kewenangan Provinsi Jawa Timur serta Penyusunan Evaluasi Capaian Akses Sanitasi Tahun 2025 dan Penyusunan Dokumen RAK LLAJ	1.800.000	20.200.000		40.600.000	Honor Tim Pendamping TFL Rp.29.818.600		
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan			123.000.000		15.000.000	108.000.000		126.000.000			
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			23.106.250		0	23.106.250		30.115.000			
Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi											
Kajian Dampak Ekonomi atas Penanganan Infrastruktur Permukiman Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Kewenangan Provinsi Jawa Timur			71.200.500		71.200.500	0		0			
Kajian Dampak Ekonomi atas Penanganan Infrastruktur Permukiman Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Skala Kawasan Desa Kepuhanyar			71.200.500		0	71.200.500		71.200.500			
Penyusunan Dokumen Kajian HIA (Heritage Impact Assessment) atas Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Kewenangan Provinsi Jawa Timur			90.000.100		90.000.100	0		0			
Penyusunan Dokumen Masterplan Penanganan Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Kewenangan Provinsi Jawa Timur			53.100.300		0	53.100.300		53.100.300			
Penyusunan Dokumen Masterplan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu			60.900.200		0	60.900.200		60.900.200			
Penyusunan Dokumen Perencanaan SID (Survey Investigation Design) Penanganan Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Kewenangan Provinsi Jawa Timur			51.800.400		0	51.800.400		51.800.400			
Penyusunan Dokumen Perencanaan SID (Survey Investigation Design) Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu			70.100.400		0	70.100.400		70.100.400			
Penyusunan Dokumen RAK LLAJ Kabupaten Mojokerto			150.000.100		0	150.000.100		150.000.100			
Penyusunan Dokumen RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah) Kabupaten Mojokerto			71.800.500		0	71.800.500		0			
Penyusunan Dokumen Evaluasi Implementasi SSK Kabupaten Mojokerto Milestone 4 Lanjutan								51.400.200			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			70.836.800		35.419.000	35.417.800		45.481.250			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			4.000.000		2.000.000	2.000.000		2.700.000			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 laporan	100.000.000		0	350.000.000	3 laporan	450.000.000		100.000.000	
Rincian :											
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			5.730.000	Fasilitasi Penyusunan Revisi RTRW	0	5.730.000		5.730.000	- BOP FS Ibukota baru 25jt		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			400		0	400		900	- Honor Tim Ahli RTRW 75jt		

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/Kurang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			3.893.400		0	3.893.400		1.455.300	- FS Pemindahan Ibukota Baru 249jt		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			4.975.000		0	4.975.000		3.960.000			
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			32.300.000		0	32.300.000		154.700.000			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			50.101.200		0	50.101.200		34.808.600			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.000.000		0	3.000.000		1.300.000			
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik								249.500.500			
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	IK 1 : Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah IK 2 : Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Riset dan Inovasi Daerah	IK 1 : 80% IK 2 : 85%	355.499.000		60.596.150	294.675.850	100,00%	599.675.850		305.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan/Dokumen Verifikasi Daftar Agenda Riset di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	0		0	0	1 Laporan	105.000.000		105.000.000	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	0		0	178.892.800	1 Laporan	105.000.000		105.000.000	
Rincian :											
Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Biaya Konsumsi (Makan) 50 Kotak x @44.000 = 2.200.000) (Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 50 Kotak x @23.000 = 1.150.000)								3.350.000	Belanja Jasa Konsultansi untuk Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai InMenDagri Nomor 2 Tahun 2025 Rp.105.000.000		
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Photo copy 230 lembar x @400 = 92.000) (Flash disk 1 buah x @105.800 = 105.800) (Gaji Tenaga Ahli D3 2org x 2bln x @6.000.000 = 24.000.000) (Gaji Tenaga Ahli S2-S3 Ahli Muda 1org x 2bln x @10.400.000 = 20.800.000)								99.997.800			

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/Kurang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Gaji Tenaga Ahli S2-S3 Ahli Madya 1org x 2bln x @13.000.000 = 26.000.000) (Gaji Tenaga Surveyor SMA-D3 13org x 1bln x @2.000.000 = 26.000.000) (Laporan Pendahuluan 5 eks x @300.000 = 1.500.000) (Laporan Final 5 eks x @300.000 = 1.500.000)											
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Tarif E-Tol 24 Km x @1.100 = 26.400) (Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud... 3 Orang/Hari x @375.000 = 1.125.000)								1.151.400			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Uang harian 5 x @100.000 = 500.000)								500.000			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (800 lembar x @1,00 = 800)								800			
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil-Hasil Riset dan Inovasi yang difasilitasi	85,00%	355.499.000		60.596.150	294.675.850	100,00%	494.675.850		200.000.000	
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	195.499.000		16.456.200	178.892.800	1 Dokumen	178.892.800		0	
Rincian :											
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			200	Fasilitasi Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Informasi dan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ-PID) Periode 2025-2030	200	0		0			
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			18.310.000		2.700.000	15.610.000		15.610.000			
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			1.020.000		1.020.000	0		0			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			24.977.700		12.736.000	12.241.700		12.091.700			
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik			151.191.100		0	151.191.100		151.191.100			
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan	2 Laporan	160.000.000		44.139.950	115.783.050	1 Laporan	315.783.050		200.000.000	

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/Kurang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan										
Rincian :											
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			650	Fasilitasi Lomba Inovasi dan Pengukuran Indeks	650	0		0	Honorarium Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D): 200jt		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			3.230.050		1.990.200	1.239.850		1.239.850			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			1.905.800		0	1.905.800		1.905.800			
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			33.010.000		6.750.000	26.260.000		37.560.000			
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			30.500.000		13.450.000	17.050.000		197.050.000			
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan			7.500.000		0	7.500.000		7.500.000			
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan			4.900.000		4.900.000	0		0			
Belanja Sewa Peralatan Umum			3.101.600		3.101.600	0		0			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			23.681.900		13.947.500	9.734.400		15.957.400			
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan			33.250.000		0	33.250.000		33.250.000			
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			16.920.000		0	16.920.000		16.920.000			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.000.000			2.000.000		4.400.000			
JUMLAH TOTAL PAGU			11.621.449.595		1.035.065.530	10.836.137.568		12.668.615.100		1.832.477.532	

Keseluruhan struktur rencana kerja dan pendanaan Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagaimana tercermin dalam tabel 3.1 menunjukkan bahwa alokasi anggaran telah diarahkan secara strategis untuk mendukung fungsi kelembagaan sebagai *enabler*, integrator, dan *knowledge-broker* pembangunan daerah. Dari sisi program dan subkegiatan, konsentrasi pendanaan tidak hanya difokuskan pada fungsi administratif, tetapi juga dialokasikan secara signifikan untuk mendukung proses koordinasi, evaluasi, integrasi perencanaan tematik, serta penguatan kualitas dokumen perencanaan lintas level.

Komposisi anggaran setelah *refocusing* memperlihatkan dua hal penting: pertama, adanya penyesuaian yang proporsional untuk efisiensi anggaran tanpa menghilangkan esensi kegiatan utama; dan kedua, kecenderungan peningkatan pada pos-pos belanja yang mendukung penguatan kapasitas teknologi, data, serta dukungan riset dan kajian kebijakan. Hal ini selaras dengan spirit tahap I Renstra 2025-2029, yakni penguatan fondasi sistemik dan kelembagaan yang akan menopang efektivitas pembangunan lima tahunan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rancangan rencana kerja dan pendanaan Bappeda Tahun 2025 telah selaras secara substansi dan logika fiskal dengan tujuan strategis periode awal Renstra. Struktur belanja yang disusun tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebutuhan teknis tahunan, tetapi juga menjadi cermin keseriusan organisasi dalam membangun tata kelola pembangunan yang presisi, responsif, dan terukur sejak tahun pertama pelaksanaan RPJMD.

3.2. *Tagging* Tematik

Setelah pemetaan rencana kerja dan pendanaan tahunan dilakukan secara sistematis, langkah berikutnya yang krusial adalah memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda juga selaras dengan arus prioritas nasional dan daerah yang bersifat lintas sektor dan lintas urusan. Dalam konteks kebijakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, *tagging* kegiatan tematik menjadi mekanisme strategis untuk menandai kontribusi nyata perangkat daerah terhadap agenda pembangunan yang bersifat lintas bidang, mendesak, dan berdampak langsung pada masyarakat.

Tagging kegiatan tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknokratis dalam penelusuran belanja publik, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk menjamin bahwa sumber daya fiskal digunakan secara tepat sasaran dan mendukung prioritas bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Dalam hal ini, Bappeda memiliki peran ganda yaitu sebagai pelaksana kegiatan yang *bertagging* tematik sekaligus sebagai institusi yang memfasilitasi sinkronisasi dan konsistensi *tagging* di seluruh perangkat daerah.

Dengan memanfaatkan pendekatan *tagging*, Bappeda turut mendorong keterpaduan antara logika intervensi kelembagaan dengan arah kebijakan nasional seperti percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, pengendalian inflasi, dan percepatan transformasi digital pemerintahan. Di tingkat daerah, mekanisme ini juga menjadi sarana untuk memetakan kontribusi nyata perangkat daerah dalam menjawab isu strategis lokal sebagaimana diidentifikasi dalam dokumen RPJMD 2025-2029 dan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Subbab ini akan menguraikan bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam perubahan rencana kerja Bappeda Tahun 2025 diberi label tematik (*tagging*) sesuai dengan kategori yang ditetapkan oleh kebijakan nasional, serta sejauh mana kegiatan-kegiatan tersebut memiliki keterhubungan langsung dengan agenda pembangunan lintas sektor yang menjadi perhatian lintas jenjang pemerintahan. Dengan demikian, *tagging* kegiatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan kepatuhan, konsistensi arah kebijakan, dan komitmen Bappeda terhadap sinergi pembangunan yang terukur dan berdampak.

Adapun *tagging* subkegiatan di Bappeda untuk perubahan rencana kerja tahun 2025 dalam mendukung program/kegiatan tematik sebagaimana tercantum pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Tagging Subkegiatan P-RENJA 2025 BAPPEDA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp.)										
				KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR	VISI-MISI
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota			1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah; 2. Persentase Realisasi Anggaran; 3. IP ASN; 4. Jumlah inovasi yang memenuhi 20 Indikator Indeks Inovasi Daerah Kemendagri	-	-	-	95.000.000	-	-	-	7.928.059.928	-	-	7.928.059.928
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Bappeda	-	-	-	7.500.000	-	-	-	7.500.000	-	-	7.500.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.500.000				7.500.000			7.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran yang tercapai	-	-	-	-	-	-	-	6.303.647.000	-	-	6.303.647.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN								6.303.647.000			6.303.647.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum	-	-	-	87.500.000	-	-	-	1.046.368.528	-	-	1.046.368.528

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp.)									
				KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR
			Yang tercapai										
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan							813.868.528			813.868.528
		Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan							145.000.000			145.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				87.500.000			87.500.000			87.500.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	-	-	-	-	-	-	177.500.000	-	-	177.500.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan							177.500.000			177.500.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	-	-	-	-	-	-	393.044.400	-	-	393.044.400
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan							115.044.892			115.044.892

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp.)										
				KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR	VISI-MISI
		Operasional atau Lapangan	yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya											
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi							277.999.508			277.999.508	
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan IK 2 : Persentase Data Perencanaan Pembangunan sesuai ketentuan SDI IK 3 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	120.748.500	-	1.129.794.908	-	1.207.519.708	-	-	1.207.519.708
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan	-	-	-	-	-	1.059.269.908	-	1.059.269.908	-	-	1.059.269.908

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp.)									
				KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR
			prioritas antar dokumen perencanaan daerah serta dengan dokren instansi vertikal										
		Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota	Jumlah Berita Acara Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten						444.172.308		444.172.308		444.172.308
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJ MD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJ MD)						615.097.600		615.097.600		615.097.600
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase data perencanaan pembangunan an yang telah memenuhi standar data, metadata, dan daftar data	-	-	-	70.525.000	-	70.525.000	-	70.525.000	-	70.525.000
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi				70.525.000		70.525.000		70.525.000		70.525.000
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		IK 1 : Persentase Capaian Kinerja PD IK 2 :	-	-	-	50.223.500	-	-	-	77.724.800	-	77.724.800

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp.)										
				KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR	VISI-MISI
			Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan											
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan							27.501.300	-	-	27.501.300	
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				50.223.500			50.223.500			50.223.500	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik IK 2 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik	475.303.538	475.303.538	475.303.538	475.303.538	475.303.538	2.607.215.288	475.303.538	2.607.215.288	753.398.550	753.398.550	2.607.215.288
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran,	475.303.538	475.303.538	475.303.538	475.303.538	475.303.538	775.673.738	475.303.538	775.673.738	-	-	775.673.738

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp.)										
				KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR	VISI-MISI
			indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik PPM dengan dokren pemda IK 2 : Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik PPM IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik PPM											
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Pemerintahan						300.370.200		300.370.200			300.370.200
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Bidang	475.303.538	475.303.538	475.303.538	475.303.538	475.303.538	475.303.538	475.303.538	475.303.538			475.303.538

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp.)										
				KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR	VISI-MISI
		Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pembanguna n Manusia											
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tema tik PSDA dengan dokumen pemda IK 2 : Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Tem atik PSDA IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tem atik PSDA	-	-	-	-	-	628.143.000	-	628.143.000	-	-	628.143.000
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renj a dengan RKPD /RPJMD						294.724.000		294.724.000			294.724.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp.)										
				KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR	VISI-MISI
			pada Bidang Perekonomian											
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Rencana dengan RKPD /RPJMD pada Bidang SDA						333.419.000		333.419.000			333.419.000
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik Infrastruktur dan Kewilayahan dengan dokren pemda IK 2 : Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik Infrastruktur Dan Kewilayahan IK 3 : Persentase	-	-	-	-	-	1.203.398.550	-	1.203.398.550	753.398.550	753.398.550	1.203.398.550

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp.)									
				KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR
			ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik Infrastruktur Dan Kewilayahan										
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Bidang Infrastruktur					753.398.550		753.398.550	753.398.550	753.398.550	753.398.550
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPM D pada Bidang Kewilayahan					450.000.000		450.000.000			450.000.000
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			IK 1 : Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah IK 2 : Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	-	-	-	494.675.850	-	-	494.675.850
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil-Hasil Riset dan Inovasi	-	-	-	-	-	-	494.675.850	-	-	494.675.850

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp.)										
				KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR	VISI-MISI
			yang difasilitasi											
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaa n di Bidang Teknologi dan Inovasi							178.892.800			178.892.800	
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan hasil Penyelengga raan Sosialisasi dan Deseminasi Hasil-hasil Kelitbangan							315.783.050			315.783.050	
JUMLAH				475.303.538	475.303.538	475.303.538	691.052.038	475.303.538	3.737.010.196	475.303.538	12.237.470.774	753.398.550	753.398.550	12.237.470.774

Hasil *tagging* kegiatan tematik dalam perubahan rencana kerja Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menunjukkan bahwa struktur program dan kegiatan yang dirancang tidak hanya berpijak pada kebutuhan internal kelembagaan, tetapi juga diarahkan secara eksplisit untuk mendukung agenda pembangunan tematik yang menjadi prioritas nasional dan daerah. Dari total alokasi anggaran perubahan sebesar Rp. 12.668.615.100, sebagian besarnya telah ditautkan (*tagged*) ke dalam minimal satu atau lebih tema pembangunan lintas sektor, seperti prioritas SDGs, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pembangunan berbasis kewilayahan dan infrastruktur, serta dukungan terhadap pelaksanaan visi-misi kepala daerah.

Secara tematik, dukungan terbesar tercermin pada pelabelan terhadap indikator SDGs (Rp3,73 miliar) serta pengarusutamaan gender dan pembangunan berbasis visi-misi kepala daerah (Rp12,14 miliar), yang menegaskan peran Bappeda sebagai simpul perencana utama dan fasilitator arah kebijakan lintas sektor. *Tagging* pada isu stunting, kemiskinan ekstrem, dan pembangunan manusia juga tampil signifikan melalui program koordinasi perencanaan tematik dan pengendalian pelaksanaan pembangunan lintas bidang. Ini mencerminkan bahwa Bappeda tidak hanya menjalankan tugas kelembagaan secara administratif, tetapi juga secara aktif menyusun perencanaan yang responsif terhadap agenda pembangunan strategis nasional maupun daerah.

Dengan keterpaduan tersebut, *tagging* kegiatan tematik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan representasi konkret bahwa Bappeda telah menginternalisasi prinsip sinergi pembangunan dan penguatan kolaborasi lintas sektor sejak tahap perencanaan. Kedepannya, hal ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem perencanaan daerah yang lebih inklusif, terukur, dan responsif terhadap tantangan pembangunan yang bersifat lintas sektor dan jangka panjang.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 merupakan bagian penting dari upaya adaptif organisasi perencana daerah dalam menjamin konsistensi, responsivitas, dan efektivitas perencanaan tahunan di tengah dinamika kebijakan, kebutuhan sektoral, serta tuntutan tata kelola pembangunan yang semakin kompleks. Dokumen ini tidak hanya menyempurnakan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, tetapi juga merefleksikan arah baru strategi pembangunan pada tahun awal pelaksanaan RPJMD 2025-2029 dan Renstra BAPPEDA 2025-2029.

Seluruh substansi dalam dokumen ini telah dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan triwulan pertama, penyesuaian terhadap dokumen RPJMD 2025-2029 dan Perubahan RKPD 2025, serta integrasi logika perencanaan berbasis sasaran strategis lembaga. Konsistensi antar dokumen, baik dari sisi indikator, nomenklatur kegiatan, hingga pagu anggaran telah terjaga, dan penajaman arah program dilakukan melalui pendekatan tematik yang memastikan setiap kegiatan berkontribusi langsung terhadap prioritas nasional dan daerah.

Dengan rencana kerja yang telah di-*tagging* sesuai agenda pembangunan tematik, dan pendanaan yang diarahkan pada penguatan sistem perencanaan, riset kebijakan, serta pengendalian lintas sektor, Bappeda Kabupaten Mojokerto memiliki landasan yang kuat untuk menjalankan perannya sebagai institusi penggerak tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan adaptif. Keseluruhan dokumen ini diharapkan tidak hanya menjadi panduan pelaksanaan kerja tahunan, tetapi juga sebagai wahana awal untuk mengkonsolidasikan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah secara terukur dan berkelanjutan.

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam proses penyusunan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025, terdapat sejumlah catatan penting yang perlu dicermati sebagai bagian dari pembelajaran kelembagaan dan penguatan kualitas perencanaan ke depan. Catatan-catatan ini tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga menggambarkan kompleksitas koordinasi, dinamika kebijakan lintas jenjang pemerintahan, serta pentingnya keterpaduan antara proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi.

Pertama, penyesuaian Perubahan Renja terhadap RKPD Perubahan dan pagu anggaran aktual memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur bidang di lingkungan Bappeda, mengingat sinkronisasi data program, indikator, dan nomenklatur subkegiatan harus dilakukan secara detail dan lintas fungsi. Proses ini menguji kemampuan organisasi dalam menjaga kesinambungan dokumen dan konsistensi arah kebijakan, terutama di tengah perubahan teknis pada SIPD-RI dan penyesuaian hasil Identifikasi Perencanaan Pembangunan pada Perubahan RKPD.

Kedua, proses *tagging* kegiatan tematik yang dilakukan berdasarkan arahan pemerintah pusat dan provinsi memerlukan pemahaman lintas sektor dan penelusuran substansi kegiatan yang lebih mendalam. Kegiatan yang sebelumnya bersifat rutin administratif kini dituntut untuk menunjukkan kontribusi nyata terhadap prioritas pembangunan strategis seperti penurunan

stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penguatan *SDGs*. Hal ini menjadi penanda penting bahwa setiap program perlu dikemas dengan orientasi outcome dan keterhubungan lintas urusan.

Ketiga, keberhasilan menjaga kesesuaian antara Perubahan Renja dengan dokumen Renstra 2025-2029 dan RPJMD 2025-2029 menunjukkan pentingnya dokumentasi teknis yang dapat diakses dengan baik. Proses penyesuaian ini menjadi lebih sistematis karena didukung oleh struktur logika kinerja yang telah dirancang sejak awal melalui pohon kinerja dan cascading sasaran. Ini menegaskan bahwa pembangunan arsitektur perencanaan strategis yang kuat sejak tahap Renstra menjadi kunci penyederhanaan proses penyesuaian dokumen tahunan.

Keempat, penyusunan dokumen ini juga memperlihatkan pentingnya ketersediaan dan validitas data dalam menyusun indikator, menetapkan target, dan melakukan evaluasi. Proses ini menunjukkan bahwa peran sistem informasi pembangunan daerah belum sepenuhnya optimal dalam memfasilitasi logika penganggaran berbasis hasil, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penguatan kapasitas internal dan penyempurnaan integrasi sistem.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa proses penyusunan Perubahan Renja ini bukan hanya tanggung jawab struktural Bappeda semata, melainkan hasil kolaborasi dari seluruh bidang serta koordinasi teknis dengan OPD lainnya. Keterbukaan, ketekunan administratif, dan keterampilan teknokratis menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas dokumen ini sebagai dokumen perencanaan yang sah, strategis, dan operasional.

Catatan-catatan tersebut diharapkan menjadi bekal untuk perbaikan tata kelola perencanaan di tahun-tahun mendatang, serta sebagai refleksi kelembagaan dalam membangun sistem perencanaan daerah yang semakin presisi, partisipatif, dan berorientasi hasil.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025 dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka dibutuhkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang dapat dijadikan acuan teknis dan operasional oleh seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda. Kaidah-kaidah ini merupakan penjabaran praktis dari prinsip-prinsip perencanaan berbasis kinerja, hasil evaluasi triwulanan, dan pendekatan tematik sebagaimana telah diuraikan pada bab dan subbab sebelumnya.

Pertama, pelaksanaan seluruh kegiatan harus mengacu pada prinsip keselarasan substansi dengan dokumen perencanaan di atasnya. Artinya, setiap output kegiatan harus mendukung pencapaian sasaran strategis Renstra Bappeda 2025-2029, serta sejalan dengan arah kebijakan dalam RPJMD 2025-2029 dan P-RKPD Tahun 2025. Setiap perubahan teknis selama pelaksanaan wajib dikonsultasikan dan diadministrasikan secara formal agar tidak menciptakan deviasi logis dalam sistem perencanaan-penganggaran.

Kedua, pelaksanaan kegiatan harus berbasis pada kalender waktu yang realistis dan memperhatikan tahapan pencairan anggaran, penyiapan dokumen pendukung, serta ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk itu, koordinasi lintas bidang dalam Bappeda harus diperkuat agar potensi keterlambatan akibat kendala administratif dapat diminimalkan sejak awal.

Ketiga, setiap pelaksanaan kegiatan harus didampingi dengan pengukuran kinerja melalui indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja. Pengumpulan data realisasi indikator harus

dilakukan secara berkala dan terstruktur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan dilaporkan melalui sistem informasi kinerja yang tersedia.

Keempat, seluruh kegiatan bertagging tematik harus dijalankan dengan memperhatikan substansi tema yang melekat. Misalnya, kegiatan yang ditandai sebagai dukungan terhadap penurunan stunting harus memperhatikan sinergi dengan *leading sector* dan OPD terkait, serta mampu mendukung sasaran tematik melalui pendekatan koordinatif maupun asistensi kebijakan. Ini berlaku pula untuk tema kemiskinan ekstrem, *SDGs*, dan prioritas nasional lainnya.

Kelima, aspek akuntabilitas pelaksanaan harus menjadi perhatian utama, baik dalam hal pertanggungjawaban keuangan, pelaporan kinerja, maupun dokumentasi kegiatan. Setiap tahapan kegiatan harus dapat ditelusuri (*traceable*) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sebagai bagian dari pemenuhan prinsip *good governance* dan penguatan nilai SAKIP pemerintah daerah.

Dengan menerapkan kaidah-kaidah pelaksanaan ini, Bappeda Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Tahun 2025 tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan, transformasi kelembagaan, dan tata kelola perencanaan yang lebih berdampak. Kaidah-kaidah ini sekaligus menjadi kompas pelaksanaan dalam menjaga konsistensi antara desain perencanaan dan implementasi di lapangan sepanjang tahun anggaran berjalan.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya memastikan bahwa seluruh rencana kerja yang telah disusun dalam Perubahan Renja Tahun 2025 dapat diimplementasikan secara konsisten dan efektif, Bappeda Kabupaten Mojokerto menetapkan sejumlah langkah tindak lanjut yang bersifat teknis dan strategis. Langkah ini mencakup penegasan peran koordinatif antarbidang, penyempurnaan jadwal pelaksanaan kegiatan, serta penguatan pengawasan internal melalui monitoring triwulanan berbasis indikator kinerja.

Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan dengan sasaran strategis lima tahunan, Bappeda akan melakukan konsolidasi data pelaksanaan program tematik dan riset kebijakan sebagai bagian dari pelaporan rutin, sekaligus menyiapkan kerangka evaluasi pertengahan tahun sebagai dasar pengambilan keputusan perbaikan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan asistensi kepada perangkat daerah dalam penyelarasan program prioritas juga akan diperkuat sebagai bagian dari agenda lintas sektor yang bersifat kolaboratif.

Rencana tindak lanjut ini juga akan diintegrasikan dengan pelaksanaan evaluasi Renstra dan RPJMD pada akhir tahun anggaran sebagai bentuk akuntabilitas perencanaan jangka menengah. Dengan demikian, seluruh upaya pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya terfokus pada pencapaian output, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelembagaan Bappeda sebagai simpul koordinasi pembangunan daerah yang strategis dan berkelanjutan.

Demikian Perubahan Renja Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2025 disusun dan semoga dapat bermanfaat serta berguna untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs.BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660618 199003 1 011



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
2025**